

DINAS KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN AGAM TAHUN 2024



1. B. B.
2. B.
3. DINAS
4. DINAS K.
5. DINAS DUK.
6. DINAS SOSIAL

KETERANGAN

- Batas Kecamatan
- Komposit Agam
- Prioritas 1
- Prioritas 2
- Prioritas 3
- Prioritas 4
- Prioritas 5
- Prioritas 6



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

2024

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN AGAM TAHUN 2024
INDIKATOR KUALITAS AIR



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN AGAM TAHUN 2024
INDIKATOR PERIKANAN



KETERANGAN

- Batas Kecamatan
- Komposit Agam
- Prioritas 1
- Prioritas 2
- Prioritas 3
- Prioritas 4
- Prioritas 5
- Prioritas 6





BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 386 TAHUN 2024
T E N T A N G
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN AGAM
TAHUN 2024
BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif di wilayah Kabupaten Agam perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Agam Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Agam Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai dasar perencanaan, dan pelaksanaan bagi Pemerintah Kabupaten Agam dalam menyusun rekomendasi kebijakan di bidang Pangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 29 Oktober 2024
Pjs. BUPATI AGAM,



ENDRIZAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 386 TAHUN 2024
TENTANG
PETA KETAHANAN DN KERENTANAN
PANGAN KABUPATEN AGAM TAHUN 2024



- a. Prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3 merupakan wilayah rentan pangan, dengan klasifikasi:
1. prioritas 1 tingkat sangat rentan pangan;
 2. prioritas 2 tingkat rentan pangan; dan
 3. prioritas 3 tingkat agak rentan pangan.
- b. Prioritas 4, prioritas 5, dan prioritas 6 merupakan wilayah tahan pangan, dengan klasifikasi:
1. prioritas 4 tingkat agak tahan pangan;
 2. prioritas 5 tingkat tahan pangan ; dan
 3. prioritas 6 tingkat sangat tahan pangan.

Pjs. BUPATI AGAM,
ENDRIZAL

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
KABUPATEN AGAM
2024



BADAN
PANGAN
NASIONAL | NATIONAL
FOOD
AGENCY



BUPATI AGAM

SAMBUTAN



Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita semua masih terus diberi kesempatan untuk berkarya dalam segala tindakan nyata untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Agam yang kita cintai ini kearah yang lebih baik khususnya dalam upaya peningkatan kondisi ketahanan pangan.

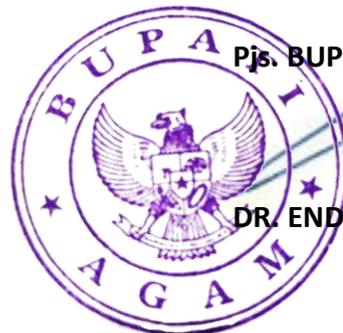
Berbagai pemikiran dan upaya telah sama-sama diarahkan disegala tingkatan, baik di provinsi maupun kabupaten untuk memberikan kontribusi yang besar bagi upaya menjadikan rakyat lebih sejahtera sejalan Visi pembangunan Kabupaten Agam 2021 - 2026 **“Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani”**.

Dengan diluncurkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Agam 2024 ini dapat menjadi arahan dan pegangan dalam penyusunan program, strategi, dan kegiatan pada setiap tahapan di lokasi-lokasi yang digambarkan dalam peta ini. Strategi yang diambil kedepannya dapat menuntaskan permasalahan pangan dan gizi serta lebih fokus dan berkesinambungan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam payung Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Mengingat penuntasan masalah pangan dan gizi adalah bersifat multi dimensional yang tidak dapat dilakukan secara sendiri dan terpisah namun harus dalam satu tatanan koordinasi yang tepat, cepat, terarah, menyeluruh dan berkesinambungan, maka Saya juga berharap dokumen ini dapat menjadi penghubung lintas sektor antar Organisasi Perangkat Daerah dalam penanganan kerawanan pangan dan gizi di Kabupaten Agam.

Saya memberikan penghargaan yang tinggi atas kerja keras dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan bantuan dari Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pangan Nasional, sehingga berhasil meluncurkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) Kabupaten Agam 2024 ini.

Pada akhirnya, semoga peta ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT memberkati segala usaha kita.


Pjs. BUPATI AGAM
DR. ENDRIZAL, SE, M.Si



NATIONAL
FOOD
AGENCY

KATA PENGANTAR



Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) Kabupaten Agam 2024 merupakan sebuah analisa yang menggambarkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan dari berbagai dimensi yang dirinci hingga pada tingkat nagari.

Secara teknis dapat dijelaskan bahwa persoalan pangan wilayah sangat bergantung pada banyak aspek (*multi dimensional*) sehingga indikator yang dipergunakan untuk menggambarkan kondisi ini terdiri dari 6 (enam) indikator dalam 3 (tiga) aspek utama yaitu Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan dan Pemanfaatan Pangan. Sehingga kedepannya diharapkan dapat menuntaskan permasalahan dan kondisi ketahanan pangan sesuai rujukan dan gambaran yang diberikan pada tingkat wilayah nagari.

Secara khusus pada kesempatan ini kami Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selaku Penanggung Jawab Tim FSVA Kabupaten Agam mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Badan Pangan Nasional dan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat atas komitmen, dukungan dan kerjasamanya untuk terus memperbaiki kondisi pangan di Kabupaten Agam. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan atas dukungan dari Tim FSVA Kabupaten Agam serta peran serta aktif dari staf Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam proses penyusunan dari tahap pengumpulan data sampai pada penyelesaiannya. Kedepan kami tetap berharap kerjasama ini terus di tingkatkan untuk menjadikan kondisi ketahanan pangan Kabupaten Agam lebih tangguh.

Akhirnya, kami sangat mengharapkan peta ini dapat dijadikan salah satu dokumen perencanaan bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dan kecamatan dalam menjawab permasalahan yang ditunjukkan oleh peta ini baik secara individu maupun komposit pangan agar permasalahan ini dapat terselesaikan secara cepat, tepat dan berkesinambungan. Kami menyadari bahwa peta ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya saran dan kritik sangat kami perlukan.

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN**



ROSWA DESWIRA, S.Pi, M.Si



UCAPAN TERIMA KASIH

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) Kabupaten Agam Tahun 2024 ini merupakan pemutakhiran dari kondisi ketahanan dan kerentanan Kabupaten Agam yang pernah dianalisa pada Tahun 2023 yang lalu. Peta ini telah diluncurkan tepat pada waktunya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak. Secara khusus terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Andri Warman, MM, selaku Bupati Agam, kepada Rosva Deswira, S.Pi, M.Si, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta kepada Fitriani, S.Tr.Keb selaku Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam.

Kepada Tim FSVA Kabupaten Agam atas kerja kerasnya dan dukungan OPD terkait yang telah mendukung ketersediaan data-data yang dibutuhkan, sehingga buku ini dapat dipublikasikan dan akan terus diupayakan untuk disosialisasikan untuk pemanfaatannya ke depan. Terima kasih untuk dukungan dana dari Badan Pangan Nasional. Peran serta dari berbagai pihak yang telah membantu juga sangat kami hargai.



BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY

**PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
KABUPATEN AGAM
TAHUN 2024**

Tim Penyusun

Pengarah

Rosva Deswira, S.Pi, M.Si

Wakil Pengarah

Ir. Aguska Dwi Fajra

Ketua

Fitriani, S.Tr.Keb

Sekretaris

Ediarta Isra Bastin, S.Hut, M.Si

Anggota

Novis Zeni Putri, S.ST, M.Si

Rita Delfianti, S.Pt

Daryulia Ningsih, S.Pi, M.Si

Fauziah Nurchaulia Edelwis, S.T

Miswarni, SP

Zulfren, SP

Ade Suryani Saldy, AMG

Irianti, Aks

Ilham Oktaria, A.Md.Tra

Riswandi, S.IP

Eko Vanrizki, ST

Nofia Natalia, SE

Wira Yulina, SKM

Kerjasama



BADAN PANGAN NASIONAL

Dan



DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN



BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Latar belakang dan tujuan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Ketahanan pangan dirumuskan sebagai adanya keterjaminan seluruh masyarakat di dalam suatu kawasan/wilayah tercukupi kebutuhan pangannya dan gizinya yang merupakan syarat utama untuk mencapai derajat kesehatan dan kesejahteraan, yang dapat diukur melalui kecukupan/ketersediaan, stabilitas ketersediaan, dan aksesibilitas. Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan selama ini telah banyak memperlihatkan tingkat keberhasilannya, seperti ditunjukkan oleh peningkatan produksi komoditas pangan, perbaikan kualitas konsumsi masyarakat dan penurunan penduduk miskin. Namun keberhasilan tersebut belum dapat sepenuhnya mengatasi tingkat kerawanan pangan. Jumlah penduduk yang rawan pangan dan kekurangan gizi masih cukup besar sehingga perlu mendapat perhatian secara terus menerus. Kerawanan pangan merupakan masalah yang kompleks, kecukupan penyediaan pangan pada tingkat makro tidak serta merta dapat mengatasi kerawanan pangan dan perbaikan kualitas konsumsi masyarakat. Disamping penyediaan, kerawanan pangan dan kualitas konsumsi masyarakat juga dipengaruhi oleh distribusi pangan, daya beli masyarakat, pengetahuan gizi masyarakat, dan terjadinya pemborosan pangan (Suryana, 2014). Kerawanan pangan merupakan masalah multi dimensional yang menurut Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Program (2005) didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktifitas dengan baik secara sementara maupun pada jangka panjang.

Kondisi kerawanan pangan merupakan kebalikan dari ketahanan pangan. Indikator pencapaian ketahanan pangan terdiri 2 (dua) indikator yaitu indikator proses dan indikator dampak. Indikator proses ditunjukkan oleh ketersediaan dan akses pangan. Indikator ketersediaan berkaitan dengan produksi pertanian, iklim, akses terhadap sumber daya alam, pengembangan institusi, pasar. Sedangkan indikator akses pangan meliputi pendapatan, akses terhadap moda perhubungan. Indikator dampak terdiri dari dua yaitu dampak secara langsung dan tidak langsung. Dampak secara langsung



BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY

meliputi konsumsi, frekuensi pangan, status gizi, sedangkan dampak secara tidak langsung meliputi penyimpanan pangan.

Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk menjadi acuan bagi para pembuat keputusan dalam penentuan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagai instrumen untuk pemantauan ketahanan pangan wilayah. Peta ketahanan dan kerentanan pangan Nasional disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan World Food Programme (WFP). Kerja sama tersebut telah menghasilkan peta kerawanan pangan (food insecurity atlas) pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2009 diluncurkan peta ketahanan dan kerentanan pangan, selanjutnya sejak tahun 2018 peta ketahanan dan kerentanan pangan dilakukan pembaharuan setiap tahun. Sebagai tindak lanjut penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan Nasional disusun peta ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan peta ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten/Kota dengan analisis sampai tingkat desa.

Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. Peta ketahanan dan kerentanan pangan selanjutnya dimanfaatkan dan digunakan untuk: (1) dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Pangan, dan (2) penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di bidang Pangan. Dengan adanya perubahan kelembagaan sesuai Peraturan Presiden

Nomor 66 Tahun 2021, mulai tahun 2022 supervisi penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Sebagai dasar pelaksanaan penyusunan Peta ketahanan dan kerentanan pangan telah terbit Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Peraturan tersebut memberikan arahan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Peta ketahanan dan kerentanan pangan. Petunjuk teknis ini merupakan penjabaran langkah operasional Peraturan Badan tersebut.

2. Temuan utama

Kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi

Nagari-nagari dikelompokkan berdasarkan pencapaian terhadap 6 indikator yang meliputi ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Berdasarkan pencapaian tersebut, maka nagari-nagari tersebut dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok prioritas yang mencerminkan situasi ketahanan pangan dan gizi, yaitu dari yang paling rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi (Prioritas 1) sampai dengan kelompok yang relatif tahan pangan dan gizi (Prioritas 6).

- Berdasarkan analisis komposit ketahanan pangan, 82 Nagari di 16 kecamatan di Kabupaten Agam dikelompokkan kedalam enam kelompok prioritas sebagai berikut: tidak ada nagari pada Prioritas 1 dan 2, 1 nagari (Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto) pada prioritas 3 (1,22 persen) dan 21 nagari pada prioritas 4 (25,61 persen), 13 nagari pada Prioritas 5 (15,85 persen), 47 nagari pada Prioritas 6 (57,32 persen). Jika dilihat dari presentasi tersebut, terdapat 1 nagari di Kabupaten Agam yang tergolong dalam nagari yang rawan pangan.
- Walaupun tidak ada nagari dalam Prioritas 1, akan tetapi Kabupaten Agam masih memiliki beberapa tantangan utama yaitu tingginya angka balita *stunting* di sebagian besar wilayah dan tingginya angka kemiskinan di beberapa nagari.

Ketersediaan pangan

- Secara umum, produksi sereal dan umbi-umbian di Kabupaten Agam terus menurun selama lima tahun terakhir. Produksi padi menurun sebesar -16,91



persen, jagung menurun sebesar -12,1 persen, ubi kayu menurun sebesar -71,72 persen dan ubi jalar menurun sebesar -52,21 persen. Sebagai perbandingan, pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Agam tahun 2020-2022 sebesar 0,99 persen.

Keterjangkauan pangan

- Akses rumah tangga terhadap pangan memiliki korelasi tinggi dengan status kemiskinan. Di Kabupaten Agam, tingkat kemiskinan meningkat dari 6,22 persen (tahun 2022) menjadi 6,60 persen (2023). Hal ini menunjukkan masih terdapat 34.988 ribu orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.
- Akses terhadap sarana penghubung sangat penting untuk menentukan tingkat konektivitas antar nagari yang menentukan aksesibilitas pangan dan distribusi serta harga pangan. Semua nagari memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun. Hampir semua nagari bisa dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, longsor, pasang, dll) yaitu nagari yang terdapat di Kecamatan Palupuh.

Pemanfaatan pangan

- Untuk tahun 2023, berdasarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, seluruh rumah tangga di Kabupaten Agam telah memiliki akses terhadap air bersih, Upaya peningkatan akses rumah tangga dengan akses air bersih di Kabupaten Agam sesuai dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat yaitu melakukan pemucuan lima pilar STBM, Edukasi, advokasi dan koordinasi percepatan stop buang air besar sembarangan, peningkatan akses rumah tangga dengan akses sarana air bersih yang memenuhi syarat kesehatan dan pemberdayaan kader untuk implementasi lima pilar STBM.
- Secara umum, akses terhadap fasilitas kesehatan dan tersedianya tenaga kesehatan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya investasi pemerintah daerah untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur kesehatan. Jumlah fasilitas kesehatan meningkat dari Tahun 2019 ke tahun 2023.



Situasi gizi dan kesehatan

- Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Agam pada tahun 2023 sebanyak 55 balita turun dari tahun 2022 sebanyak 65 balita. Jumlah penderita gizi buruk yang tinggi ditemukan di Kecamatan Ampek Angkek (11 balita), dan terendah ditemukan di Kecamatan IV Koto, Baso, Palupuh dan Malalak (0 balita).

Peta FSVA Kabupaten Agam Tahun 2024 ini jika dibandingkan dengan FSVA 2023. Secara total nagari per prioritas, terdapat penurunan nagari yang berada pada kerentanan pangan sebanyak 9 nagari atau 10,98 persen.

3. Tantangan Ketahanan Pangan

Di Kabupaten Agam, terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan utama bagi ketahanan pangan, diantaranya adalah:

- Laju pertumbuhan penduduk di Agam dari tahun 2020 ke 2022 mencapai 0,99 persen (BPS, 2023), sementara pertumbuhan produksi tanaman dalam lima tahun terakhir mencapai -16,91 persen untuk padi dan -12,10 persen untuk jagung. Walaupun demikian, fluktuasi curah hujan dan terus berkurangnya lahan pertanian yang tersedia merupakan faktor risiko utama.
- Konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian juga merupakan suatu hal yang wajib menjadi perhatian pemerintah. Walaupun dalam lima tahun terakhir tidak terjadi perubahan signifikan terkait jumlah lahan non pertanian, namun tingginya kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal serta ke butuhan lahan untuk perumahan dapat mengurangi luasan lahan pertanian dari tahun ke tahun.
- Rata rata luas lahan yang dikuasai per rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Agam pada tahun 2023 berdasarkan data Sensus Pertanian 2023 adalah sekitar 0,72 hektar per rumah tangga petani (ST 2023). Dengan luas lahan usaha tani seperti ini, meski produktivitas per luas lahan tinggi tetap merupakan tantangan besar bagi Pemerintah kabupaten dalam mengamankan produksi padi/beras untuk mendukung ketahanan pangan daerah, dan peningkatan daya saing komoditas pertanian.



- Selain itu, tingginya presentasi petani gurem di Agam beresiko mempengaruhi ketahanan pangan di Agam. Berdasarkan ST 2023 hampir 70,20 persen (57.926 rumah tangga) dari 82.505 rumah tangga usaha pertanian di Agam merupakan rumah tangga petani gurem (BPS, 2023).

Pertumbuhan ekonomi yang kuat serta didukung dengan kapasitas kelembagaan keuangan, Kabupaten Agam memiliki potensi yang positif untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi pada beberapa tahun mendatang. Hal ini membutuhkan program yang lebih fokus pada pengurangan kemiskinan dan program bermuatan gizi serta diversifikasi makanan.



DAFTAR ISI

SAMBUTAN

KATA PENGANTAR

UCAPAN TERIMA KASIH

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1. Dasar Pemikiran dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	3
2. Kerangka konsep ketahanan pangan dan gizi	5
3. Metodologi	6
4. Metode Analisis	12
5. Pemetaan	14
BAB 2 ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN	15
1. Luas Lahan Produksi	16
2. Jumlah Prasarana dan Sarana Penyedia Pangan	23
3. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan	25
BAB 3 ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN	28
1. Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah	29
2. Akses Penghubung	33
3. Strategi Peningkatan Keterjangkauan Pangan	35
BAB 4 ASPEK PEMANFAATAN PANGAN	37
1. Akses terhadap Air Bersih	38
2. Akses terhadap Tenaga Kesehatan	39
3. Dampak dari Status Kesehatan	41
4. Strategi untuk Peningkatan Pemanfaatan Pangan	43
BAB 5 KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT	44
1. Kondisi Ketahanan Pangan	45
2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan	46
BAB 6 REKOMENDASI KEBIJAKAN	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB 1

PENDAHULUAN



Secara Geografis Kabupaten Agam terletak Antara $00^{\circ} 01'34''$ - $00^{\circ} 28'43''$ Lintang Selatan dan $99^{\circ} 46'39''$ - $100^{\circ} 32'50''$ Bujur Timur. Berada pada ketinggian antara 0 - 2.877 meter di atas permukaan laut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, selatan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Tanah Datar, timur dengan Kabupaten Lima Puluh Kota dan barat dengan Samudera Indonesia. Terdapat sebanyak enam belas kecamatan di Kabupaten Agam, dengan kecamatan terluas berada di Kecamatan Palembayan dengan luas sebesar 349,77 km² dan kecamatan terkecil berada di Kecamatan Banuhampu dengan luas sebesar 28,48 km² (BPS, 2024).

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Agam atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 adalah 23.924,34 milyar rupiah dan tahun 2023 naik menjadi 26.162,66 milyar rupiah. Sedangkan menurut harga konstan 2022, 15.572,21 milyar rupiah pada tahun 2022 naik menjadi 16.275,98 milyar rupiah pada tahun 2023. Struktur ekonomi Kabupaten Agam pada tahun 2023 menurut lapangan usaha didukung oleh tiga lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, lapangan usaha jasa Lainnya, serta

lapangan usaha Informasi dan Komunikasi. Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan sumbangan terhadap perekonomian Kabupaten Agam sebesar 35,19 persen.

Struktur ekonomi Kabupaten Agam tahun 2023 menurut pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (53,32 persen), diikuti pembentukan modal tetap bruto (30,13 persen). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam pada tahun 2023 mengalami percepatan dibandingkan 2022. Ini diakibatkan karena aktivitas ekonomi semakin membaik setelah pandemi Covid-19 pada 2021. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 4,52 persen, sedangkan tahun 2022 sebesar 4,21 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12,66 persen dan lapangan usaha jasa Lainnya sebesar 5,89 persen. Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah adalah lapangan usaha Pertambangan dan Pengalihan sebesar 0,09 persen, (BPS, 2024 Kabupaten Agam Dalam Angka).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 mencapai 73,26 persen. Dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, Kota Padang merupakan Kota dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi pada tahun 2023 (83,29) diikuti Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kota Solok. IPM Kabupaten Agam pada tahun 2023 sebesar 73,29, ini merupakan IPM tertinggi bersama IPM Kabupaten Tanah Datar jika dibandingkan dengan 12 kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Sedangkan IPM terendah di Provinsi Sumatera Barat berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai (62,19), (BPS, 2024 Kabupaten Agam Dalam Angka).

Selain pencapaian diatas, terdapat beberapa indikator di Kabupaten Agam, yang terkait dengan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals – MDG*), yang perlu mengalami perbaikan, yaitu:

1. Dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 530.290/kapita/bulan pada Tahun 2023, terdapat sebesar 33,41 ribu jiwa di Kabupaten Agam yang dinyatakan miskin atau setara dengan 6,60 persen penduduk Kabupaten Agam. Dengan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,75 poin dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,13 poin, (BPS, 2024).
2. Masih tingginya kesenjangan pendapatan antar penduduk, hal ini ditunjukkan dari kenaikan koefisien gini sebesar 0,194 pada tahun 2023, (BPS, 2024).
3. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), yaitu 11 kejadian Angka Kematian

Ibu selama tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang hanya terdapat 7 kejadian, (BPS, 2024).

4. Masih cukup tingginya Prevalensi *stunting* (balita pendek dan sangat pendek), yaitu sebesar 20,1 persen (data SKI, 2023). Angka ini masih tergolong dalam kelompok “Buruk” jika mengacu pada Klasifikasi WHO tentang masalah kesehatan masyarakat untuk prevalensi kurang gizi (Dinas Kesehatan, 2024).
5. Akses sanitasi yang layak masih dibawah target yang diharapkan 85 persen, walaupun mengalami peningkatan dari 57,5 persen pada tahun 2022 menjadi 80,93 persen pada tahun 2023 (Dinas Kesehatan, 2024).

Selain indikator-indikator diatas, peningkatan produktivitas juga sangat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur di satu daerah. Terdapat 2.021,72 km jalan di Kabupaten Agam pada tahun 2023 dimana sepanjang 138,56 km merupakan jalan negara yang berstatus baik dengan permukaan hotmix; 188,53 km jalan provinsi yang keseluruhannya telah di hotmix; dan berstatus baik dan 1.694,63 km sisanya merupakan jalan kabupaten dengan 19,09 persennya masih kerikil dan tanah selain itu 8,15 persen jalannya masih berstatus rusak berat. (BPS, 2024).

Sebagai kabupaten yang sangat rawan bencana, Agam juga menghadapi dampak perubahan iklim, yang beresiko terhadap meningkatnya kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi yang bersifat transien dan kronis di Kabupaten Agam. Dengan kondisi tersebut, ditambah dengan meningkatnya jumlah penduduk, dan kebutuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang bergerak lambat, maka ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten Agam harus terus menjadi perhatian utama.

1.1 Dasar Pemikiran dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk menjadi

acuan bagi para pembuat keputusan dalam penentuan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagai instrumen untuk pemantauan ketahanan pangan wilayah. Peta ketahanan dan kerentanan pangan Nasional disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan World Food Programme (WFP). Kerja sama tersebut telah menghasilkan peta kerawanan pangan (food insecurity atlas) pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2009 diluncurkan peta ketahanan dan kerentanan pangan, selanjutnya sejak tahun 2018 peta ketahanan dan kerentanan pangan dilakukan pembaharuan setiap tahun. Sebagai tindak lanjut penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan Nasional disusun peta ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan peta ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten/Kota dengan analisis sampai tingkat desa.

Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. Peta ketahanan dan kerentanan pangan selanjutnya dimanfaatkan dan digunakan untuk: (1) dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Pangan, dan (2) penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di bidang Pangan. Dengan adanya perubahan kelembagaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, mulai tahun 2022 supervisi penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Sebagai dasar pelaksanaan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan telah terbit Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Peraturan tersebut memberikan arahan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Peta ketahanan dan kerentanan pangan.

Pemutakhiran yang dilakukan Badan Pangan Nasional dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota antara lain: (1) pemutakhiran form analisis, (2) perbaikan definisi indikator, (3) perluasan sumber data indikator, dan (4) teknik pemetaan. Dengan demikian, diharapkan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten/Kota dapat lebih tepat dan akurat sesuai dengan kondisi aktual ketahanan pangan wilayah.

1.2 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

Kerangka konseptual Ketahanan Pangan dalam penyusunan FSVA 2024 (Gambar 1) dibangun berdasarkan 3 (tiga) pilar Ketahanan Pangan: Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan dan Pemanfaatan Pangan, serta mengintegrasikan gizi dan keamanan Pangan di dalam keseluruhan pilar tersebut. Pilar **Ketersediaan Pangan** didefinisikan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan Pangan nasional, dan impor Pangan.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi

Pilar **keterjangkauan Pangan** didefinisikan sebagai kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup Pangan yang bergizi, melalui 1 (satu) atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, *barter*, hadiah, pinjaman dan bantuan Pangan. Dalam kerangka Ketahanan Pangan, keterjangkauan menjadi penting karena Pangan yang tersedia dalam jumlah yang cukup di suatu wilayah bisa jadi tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena keterbatasan fisik, ekonomi atau sosial.

Pilar **pemanfaatan pangan** merujuk pada penggunaan Pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan Pangan meliputi cara penyimpanan, pengolahan, penyiapan dan keamanan makanan dan minuman, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga.

Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk mengukur pemanfaatan Pangan rumah tangga.

Untuk mendukung berjalannya ketiga pilar tersebut diperlukan sumber daya dan lingkungan strategis di antaranya situasi politik dan ekonomi makro yang kondusif, perdagangan internasional dan domestik yang berkeadilan bagi produsen dan konsumen, ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, kondisi iklim dan agroekologi serta ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang mendukung peningkatan produksi Pangan. Memadainya sumber daya dan lingkungan strategis akan memudahkan kinerja ketiga pilar Ketahanan Pangan untuk mewujudkan tujuan akhirnya yaitu meningkatnya status Pangan dan gizi rumah tangga maupun nasional. Status Pangan dan gizi rumah tangga dan nasional tercermin dari sumber daya manusianya yang dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

1.3 Metodologi

Kerentanan Pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah Ketahanan Pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan beberapa indikator ke dalam 3 (tiga) kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan dan Pemanfaatan Pangan. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan Pangan bergizi, tersebar di dalam 3 (tiga) kelompok tersebut.

Kerentanan terhadap kerawanan Pangan di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota memiliki karakteristiknya masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan Pangan di tingkat kabupaten/kota. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan wilayah rentan rawan Pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi Ketahanan Pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar Ketahanan Pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data di tingkat desa/kelurahan. Dengan pertimbangan tersebut, maka indikator yang digunakan dalam FSVA Pemerintah Daerah Kabupaten sebanyak 6 (enam) indikator dan FSVA Pemerintah Daerah Kota sebanyak 5 (lima) indikator yang mencerminkan 3 (tiga) aspek Ketahanan Pangan. Indikator luas lahan pertanian tidak digunakan dalam analisis komposit

FSVA Kota.

Tabel 1.1: Indikator Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Agam, 2024

Aspek	Indikator
Ketersediaan Pangan	Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk
	Rasio jumlah prasarana dan sarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga
Keterjangkauan Pangan	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk
	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai darat, air atau udara
Pemanfaatan Pangan	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga
	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk

1.3.1 Ketersediaan Pangan

Definisi Ketersediaan Pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah kondisi tersedianya Pangan hasil produksi dalam negeri, cadangan Pangan nasional, dan impor Pangan.

Ketersediaan Pangan ditentukan oleh produksi Pangan di wilayah tersebut, perdagangan Pangan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah, dan bantuan Pangan dari pemerintah atau organisasi lainnya.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi Pangan, keberadaan prasarana dan sarana penyedia Pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan Pangan di suatu wilayah. Untuk menggambarkan situasi ketersediaan Pangan dalam penyusunan FSVA Kabupaten, maka indikator yang digunakan adalah: (1) Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk; dan (2) Rasio jumlah prasarana dan sarana penyedia Pangan terhadap jumlah rumah tangga. Sedangkan dalam penyusunan FSVA Kota, indikator rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk tidak digunakan dalam analisis komposit.

a. Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara luas lahan pertanian (sawah, ladang, pekarangan, kebun, lahan perikanan budidaya, dan lainnya) penghasil Pangan (produktif) dengan jumlah penduduk. Lahan pertanian memiliki nilai manfaat penggunaan (*use value*) yang didapat dari hasil kegiatan usaha tani yang dilakukan pada lahan tersebut.

Rasio lahan pertanian terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan Pangan karena lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan Pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi Pangan. Luas lahan pertanian dapat mengacu pada luasan tanam di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk maka diasumsikan ketersediaan Pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah tersebut juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

b. Rasio Jumlah Prasarana dan Sarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga

Rasio jumlah prasarana dan sarana penyedia Pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah prasarana dan sarana penyedia Pangan dengan jumlah rumah tangga di desa.

Prasarana dan sarana penyedia Pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpan Pangan (stok Pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen Pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio prasarana dan sarana penyedia Pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan Pangan di desa tersebut. Rendahnya kualitas infrastruktur, terbatasnya akses terhadap aset produktif, terbatasnya akses terhadap kegiatan ekonomi produktif merupakan penyebab kemiskinan dan kerawanan Pangan.

Indikator prasarana dan sarana penyedia Pangan digunakan sebagai indikator yang melengkapi indikator sebelumnya karena bisa jadi suatu wilayah desa tidak memiliki potensi untuk memproduksi Pangan sendiri, namun desa tersebut memiliki prasarana dan sarana penyedia Pangan sehingga ketersediaan Pangan di desa tersebut masih dapat mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Prasarana dan sarana penyedia Pangan antara lain:

- 1) pasar dengan bangunan permanen (memiliki atap, lantai, dan dinding);
- 2) pasar dengan bangunan semi permanen (memiliki atap dan lantai, tanpa dinding);
- 3) pasar tanpa bangunan (misalnya: pasar subuh, pasar terapung, dll.);
- 4) jumlah minimarket/swalayan (tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan label harga, sistem pelayanan mandiri, luas lantai < 400 m² (kurang dari empat ratus meter persegi);
- 5) toko/warung kelontong (tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual berbagai jenis barang keperluan sehari-hari secara eceran, tanpa ada sistem pelayanan mandiri);
- 6) toko/warung kelontong yang menjual bahan Pangan (sembako);
- 7) warung/kedai makanan minuman (usaha Pangan siap saji di bangunan tetap, pembeli biasanya tidak dikenai pajak);
- 8) restoran/rumah makan (usaha Pangan siap saji di bangunan tetap, pembeli biasanya dikenai pajak);
- 9) kelompok pertokoan (minimal 10 (sepuluh) toko dan mengelompok dalam satu lokasi);
- 10) hotel (menyediakan jasa akomodasi dan ada restoran, penginapan dengan izin usaha sebagai hotel);
- 11) penginapan: hostel / motel / losmen / wisma (menyediakan akomodasi, penginapan dengan izin usaha bukan sebagai hotel); dan
- 12) lumbung Pangan, gudang, penggilingan, usaha mikro dan kecil dan menengah, dan sarana penyedia Pangan lainnya.

1.3.2 Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan Pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, *barter*, hadiah, pinjaman dan bantuan Pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi**: kemampuan keuangan untuk membeli Pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik**: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber Pangan; dan/atau (3) **Akses sosial**: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses Pangan, seperti *barter*, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten/Kota, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan Pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk



dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

a. Rasio Jumlah Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Terhadap Jumlah Penduduk Desa

Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah dengan jumlah penduduk desa.

Penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah diasumsikan tidak memiliki daya beli yang memadai untuk mengakses Pangan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi status kerawanan Pangan. Kemiskinan merupakan penyebab Kerentanan Pangan wilayah.

b. Desa yang Tidak Memiliki Akses Penghubung Memadai Melalui Darat, Air Atau Udara

Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan mempertimbangkan prasarana dan sarana transportasi darat, air, atau udara. Kriteria akses penghubung yang digunakan meliputi: (1) dapat dilalui sepanjang tahun; (2) dapat dilalui sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, pasang, dll); (3) dapat dilalui selama musim kemarau; (4) tidak dapat dilalui sepanjang tahun.

Terdapat hubungan antara infrastruktur dan kondisi sosial ekonomi dengan Ketahanan Pangan. Masyarakat yang tinggal di wilayah terisolir atau terpencil tanpa sarana penghubung yang memadai dapat menimbulkan “kemiskinan lokal” karena mereka kurang memiliki akses ke pelayanan jasa secara maksimal, termasuk dalam memperoleh Pangan.

1.3.3 Pemanfaatan Pangan

Aspek ketiga dari konsep Ketahanan Pangan adalah pemanfaatan Pangan. Pemanfaatan Pangan meliputi: (1) Pemanfaatan Pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan Pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses

pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis Pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten/Kota, aspek pemanfaatan Pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

a. Rasio Jumlah Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Terhadap Jumlah Rumah Tangga

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga tanpa akses ke air bersih dengan jumlah rumah tangga di desa. Rumah tangga tanpa akses ke air bersih, yaitu rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air isi ulang, leding/PAM, sumur bor/pompa air, sumur terlindung serta mata air yang terlindung dengan memperhatikan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat minimal 10 m (sepuluh meter).

Akses terhadap air bersih memegang peranan yang sangat penting untuk pencapaian Ketahanan Pangan. Air yang tidak bersih akan meningkatkan angka kesakitan dan menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan dan pada akhirnya akan mempengaruhi status nutrisi seseorang. Semakin besar rasio rumah tangga tanpa akses air bersih diduga akan berpengaruh terhadap Kerentanan Pangan wilayah. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu. Daerah yang akses terhadap air bersihnya rendah maka ditemukan kejadian malnutrisi yang tinggi pula.

b. Rasio Jumlah Penduduk Desa Per Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, pranata laboratorium, ahli gizi, sanitarian, sarjana kesehatan masyarakat, asisten apoteker, perawat gigi, pelaksana kesehatan, penata rontgen, dan tenaga kesehatan lainnya)

dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk akan mempengaruhi tingkat Kerentanan Pangan.

1.4. Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.1. Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot
I	Aspek Ketersediaan Pangan	1/3
1.	Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	1/6
II	Aspek Keterjangkauan Pangan	1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai	1/6
III	Aspek Pemanfaatan Pangan	1/3
5	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6
6	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6

- c. Mengelompokan desa/kelurahan ke dalam 6 (enam) kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 (enam) kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* 0-100 (nol sampai seratus), dengan rumus:

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 a_i C_{ij} \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

K_j : *cut off point* komposit ke-J

a_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 (satu) adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dari pada desa/kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 (enam) merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

1.5. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

BAB 2

ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN



Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan (termasuk pangan kaya gizi) dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan, termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan, apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Sedangkan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan. Produksi pangan meliputi produksi tanaman pangan seperti sereal dan umbi-umbian, kacang-kacangan, biji minyak, sayuran dan buah-buahan serta peternakan dan perikanan. Produksi tergantung pada berbagai faktor seperti iklim, jenis dan kualitas/kesuburan tanah, curah hujan, sarana pertanian (irigasi, sarana produksi pertanian dan teknologi), serta insentif bagi petani untuk memproduksi tanaman pangan.

Mengingat sebagian besar bahan pangan yang diproduksi maupun diimpor harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga, maka infrastruktur pasar, distribusi dan perdagangan akan terkait erat dengan

ketersediaan pada tingkat regional dan lokal. Dengan daerah yang cukup luas (16 kecamatan dan 92 nagari), kelancaran distribusi merupakan tantangan tersendiri di Kabupaten Agam. Kabupaten Agam telah memiliki dukungan transportasi yang cukup memadai, untuk menghubungkan Kabupaten Agam dengan provinsi atau daerah-daerah lain di Pulau Sumatera.

2.1 Luas Lahan dan Produksi

Agam merupakan daerah sentra pangan di Sumatera Barat, bahkan secara umum merupakan kabupaten yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyediaan pangan regional. Luas wilayah daratan di Agam secara keseluruhan adalah 2.226,27 km² dengan komposisi lahan sawah seluas 26.330 Ha, lahan bukan sawah seluas 164.856 Ha dan lahan bukan pertanian seluas 32.044 Ha (Dinas Pertanian. 2023).

Pemanfaatan lahan pertanian di Agam meliputi lahan sawah dan lahan pertanian bukan sawah. Pemanfaatan lahan sawah terdiri dari irigasi seluas 23.505,39 Ha, non irigasi seluas 2.824,74 Ha. Sedangkan untuk lahan pertanian bukan sawah memiliki total luasan sebesar 164.856 Ha, yang diantaranya terdiri dari tegal dengan luas 27.298 Ha, ladang seluas 14.228 Ha (Dinas Pertanian. 2023).

Nilai PDRB Kabupaten Agam atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 adalah 23.924,34 milyar rupiah dan tahun 2023 naik menjadi 26.162,66 milyar rupiah. Sedangkan menurut harga konstan 2022, 15.572,21 milyar rupiah pada tahun 2022 naik menjadi 16.275,98 milyar rupiah pada tahun 2023. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang terbesar memberikan kontribusi sebesar 28,20 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 28,70 persen. (BPS, 2023). Hal ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Hortikultura

Produksi sayuran di Kabupaten Agam didominasi oleh terung, tomat, bawang merah, cabai rawit, dan buncis. Bila dibandingkan dengan produksi tahun 2022, pada tahun 2023 beberapa komoditi mengalami penurunan dan kenaikan produksi. Penurunan produksi tersebut salah satunya terdapat pada tomat pada tahun 2021 mempunyai luas 91.412 ha menjadi 77.755 ha. Produksi buah-buahan terbanyak pada tahun 2023 di Kabupaten Agam adalah jeruk siam (153.783 kwintal), pisang (134.283 kwintal), alpukat (93.668 kwintal), manggis

(40.063 kwintal), dan durian (19.880 kwintal).

Perkebunan

Komoditi perkebunan dengan luas tanam paling besar di Kabupaten Agam tahun 2023 adalah kelapa sawit dan kelapa. Dari seluruh jenis perkebunan tahun 2023 tercatat luas tanam kelapa sawit dan kelapa masing-masing seluas 19.874 hektar dan 10.271 hektar dengan produksi 18.578,79 ton dan 11.679,01 ton. Tanaman kelapa sawit paling banyak diusahakan oleh masyarakat di Kecamatan Lubuk Basung dan Ampek Nagari, sedangkan tanaman kelapa paling banyak diusahakan oleh masyarakat di Kecamatan Lubuk Basung dan Tanjung Mutiara.

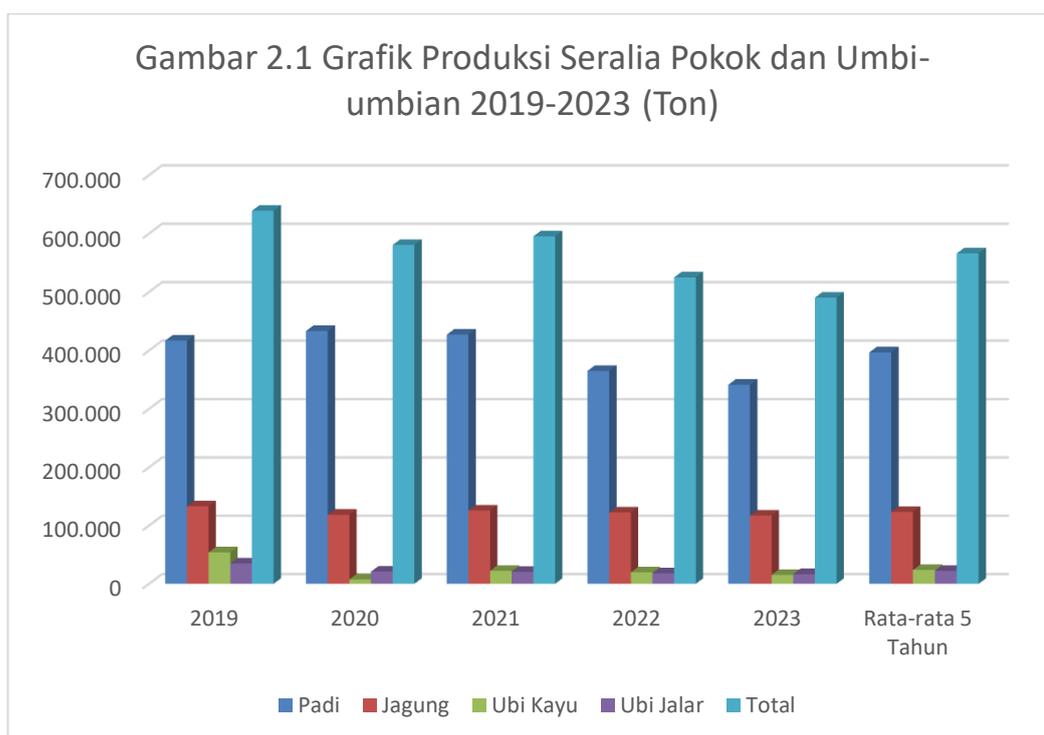
Tanaman Pangan

Pada tahun 2023 terdapat sebesar 27.297 hektar lahan tegal/kebun, 14.228 hektar lahan ladang huma, dan 7.479 hektar lahan yang sementara tidak diusahakan di Kabupaten Agam. Sebanyak 68.230 hektar Padi Sawah di panen pada tahun 2023 dengan menghasilkan 65,04 ton padi. Kecamatan dengan luas panen terluas adalah Lubuk Basung (10.794,6 hektar), Palembayan (8.621 hektar) dan Tanjung Raya (6.234 hektar). Sementara itu produksi padi terbesar terdapat di Kecamatan Lubuk Basung (53.001 ton), Palembayan (40.605 ton), dan Tilatang Kamang (33.655 ton) Sebanyak 16.019 hektar lahan jagung yang di panen pada tahun 2023 dengan total produksi sebanyak 117.098,6 ton. Penyumbang terbesar produksi jagung di Kabupaten Agam yaitu Kecamatan Lubuk Basung dan Kecamatan Ampek Nagari secara berturut-turut sebesar 51.582,5 ton dan 48.875,6 ton. Kecamatan Baso merupakan kecamatan dengan produksi ubi kayu terbanyak pada tahun 2023 yaitu sebesar 4.264 ton, sementara itu untuk komoditas ubi jalar, produksi terbanyak juga terdapat di Kecamatan Baso yaitu sebesar 6.414,15 ton.

Tabel 2.1 Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian 2019-2023 (Ton)

Serealia	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata 5 Tahun
Padi	416.828	433.359	427.076	365.022	341.353	396.727,60
Jagung	133.253	118.562	125.612	122.293	117.098,90	123.363,78
Ubi Kayu	54.012	7.575	22.230	19.569,90	15.299	23.737,18
Ubi Jalar	34.871	20.962	20.408	18.102,30	16.666,45	22.201,95
Total	638.964	580.458	595.326	524.987,20	490.417,35	566.030,51

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2019-2023, BPS



Tabel 2.2 Produksi Total Sereal per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam (2019-2023)

Kecamatan	Produksi Total Sereal					Laju Pertumbuhan 2019-2023
	2019	2020	2021	2022	2023	
Tanjung Mutiara	25.737	18.267	18.654	30.698	16.226,30	-36,95
Lubuk Basung	118.439	128.081	137.670	107.021	103.851,50	-12,32
Tanjung Raya	42.245	38.817	37.463	33.744	31.126,70	-26,32
Matur	27.416	19.793	22.249	20.886	18.917,40	-31,00
IV Koto	18.871	17.353	18.881	16.250	16.682,13	-11,60
Banuhampu	9.945	14.508	14.847	14.169	12.464,03	25,33
Ampek Angkek	25.759	26.921	26.833	22.314	26.821,80	4,13
Baso	29.748	32.177	29.742	28.200	36.836,45	23,83
Tilatang Kamang	40.283	38.285	38.222	35.950	39.626,84	-1,63
Palupuh	21.311	15.739	14.188	12.193	12.036	-43,52
Palembayan	34.766	50.013	52.757	46.268	46.164,80	32,79
Sungai Pua	15.859	11.093	8.349	7.633	8.783,40	-44,62
Ampek Nagari	41.880	66.546	67.186	67.299	61.496,60	46,84

Candung	25.471	24.513	22.098	20.164	19.761,90	-22,41
Kamang Magek	33.591	35.451	31.285	28.499	28.807,50	-14,24
Malalak	15.360	14.364	12.230	11.650	10.814,00	-29,60
Jumlah	526.681	551.921	552.654	502.938	490.417,35	-6,89

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2019-2023, BPS

Tahun 2023, total produksi sereal dan umbi-umbian mencapai 490.417,35 ton, padi 341.353 ton, jagung 117.098,9 ton, ubi kayu 15.299 ton dan ubi jalar 16.666,45 ton.

Total produksi sereal dan laju pertumbuhan produksi tahun 2019-2023 menunjukkan penurunan sebesar -6,89 %, yaitu dari total produksi tahun 2019 sebesar 526.681 ton menjadi 490.417,35 ton pada tahun 2023. Sebaran total produksi sereal selama 5 tahun terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 552.654 ton dan terkecil pada tahun 2023 sebesar 490.417,35 ton. Produksi sereal pertahun dan laju pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Padi

Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Agam selama 5 tahun terakhir (2019-2023) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 2.3. Produksi padi mengalami penurunan pada tahun 2023 di semua kecamatan. Penurunan ini terjadi banyaknya alih fungsi lahan sawah menjadi lahan jagung dan perumahan, alih fungsi yang tertinggi terjadi di Kecamatan Sungai Pua sebesar 53,54%, Kecamatan Palupuah sebesar 40,45% dan Kecamatan Tanjung Mutiara sebesar 39,77%. Produksi padi tertinggi di Kecamatan Lubuk Basung sebesar 79.160 ton pada tahun 2021, dan produksi padi terendah di Kecamatan Sungai Pua sebesar 7.070 ton pada tahun 2023.

Tabel. 2.3. Produksi Padi

Kecamatan	Produksi Total Padi (ton)					Laju Pertumbuhan
	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
Tanjung Mutiara	19.023	14.935	14.986	27.456	11.457	-39,77
Lubuk Basung	70.528	72.624	79.160	53.001	50.409	-28,53
Tanjung Raya	38.303	35.920	35.373	31.793	28.755	-24,93
Matur	25.616	19.615	22.028	20.376	18.631	-27,27
IV Koto	17.901	17.284	18.812	16.161	16.065	-10,26
Banuhampu	9.457	14.254	14.545	13.923	11.630	22,98
Ampek Angkek	22.243	25.166	25.100	20.884	20.901	-6,03
Baso	26.492	30.896	28.744	26.977	24.672	-6,87

Tilatang Kamang	33.483	37.583	36.683	33.655	31.399	-6,22
Palupuh	20.212	15.662	14.188	12.185	12.036	-40,45
Palembayan	21.511	44.476	45.143	40.605	40.432	87,96
Sungai Pua	15.218	10.962	8.226	7.574	7.070	-53,54
Ampek Nagari	20.064	20.811	19.446	16.419	12.621	-37,10
Candung	25.434	24.166	21.958	20.083	18.613	-26,82
Kamang Magek	29.983	34.641	30.422	27.903	25.848	-13,79
Malalak	15.360	14.364	12.231	11.650	10.814	-29,60
Jumlah	410.828	433.359	427.045	380.645	341.353	-16,91

Sumber. Kabupaten Agam dalam angka 2019-2023 (BPS)

Jagung

Pada tahun 2023 produksi jagung mencapai 117.098,9 ton. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan -12,1 %, penurunan produksi pada tahun 2023 disebabkan menurunnya produktifitas tanaman jagung. Sebaran produksi jagung terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 58.510 ton, kontribusi terbesar tersebut terjadi di Kecamatan Lubuk Basung sebesar 58.510 ton, menyusul Kecamatan Ampek Nagari sebesar 50.880 ton dan terendah Kecamatan Palupuh sebesar 8 ton pada tahun 2022. Secara rinci produksi jagung tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Produksi Jagung

Kecamatan	Produksi Total Jagung (ton)					Laju Pertumbuhan
	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
Tanjung Mutiara	6.714	3.332	3.668	3.242	2.849,3	-57,6
Lubuk Basung	47.911	55.457	58.510	54.020	51.582,5	7,7
Tanjung Raya	3.942	2.897	2.089	1.951	2.371,7	-39,8
Matur	1.800	178	222	510	286,4	-84,1
IV Koto	970	69	70	89	42,0	-95,7
Banuhampu	488	254	302	246	221,7	-54,6
Ampek Angkek	3.516	1.755	1.733	1.430	1.540,8	-56,2
Baso	3.256	1.281	998	1.223	1.486,3	-54,4
Tilatang Kamang	6.800	702	1.539	2.295	1.820,4	-73,2
Palupuh	1.099	77	-	8	-	-100,0
Palembayan	13.255	5.537	7.614	5.663	5.212,8	-60,7
Sungai Pua	641	131	124	59	28,6	-95,5
Ampek Nagari	39.216	45.735	47.741	50.880	48.875,6	24,6
Candung	37	347	140	81	106,5	187,8
Kamang Magek	3.608	810	863	596	674,3	-81,3
Malalak	-	-	-	-	-	0,0
Jumlah	133.253	118.562	125.613	122.293	117.098,9	-12,1

Sumber. Kabupaten Agam dalam angka 2019-2023 (BPS)

Ubi Kayu

Produksi ubi kayu menurun dari 54.012 ton pada tahun 2019 menjadi 15.299 ton pada tahun 2023. Daerah yang merupakan sentra produksi ubi kayu terbesar pada tahun 2023 yaitu kecamatan Baso sebesar 4.264 ton. Rincian produksi ubi kayu tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.5

Tabel 2.5. Produksi Ubi Kayu

Kecamatan	Produksi Total Ubi Kayu (ton)					Laju Pertumbuhan
	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
Tanjung Mutiara	1.600	1.303	2.262	1.908	1.920	20,00
Lubuk Basung	2.150	1.274	6.512	6.148,60	1.860	-13,49
Tanjung Raya	-	-	-	-	-	0,00
Matur	-	-	-	-	-	0,00
IV Koto	3.735	352	89	90	120	-96,79
Banuhampu	2.658	-	-	-	-	0,00
Ampek Angkek	2.101	1.636	1.331	679	880	-58,12
Baso	7.045	44	4.169	4.301,60	4.264	-39,47
Tilatang Kamang	17.100	2.166	4.590	4.085,10	3.813	-77,70
Palupuh	1.860	-	-	-	-	0,00
Palembayan	5.766	-	1.421	498	520	-90,98
Sungai Pua	1.112	-	-	-	-	0,00
Ampek Nagari	-	-	-	-	-	0,00
Candung	2.008	-	799	408	200	-90,04
Kamang Magek	6.967	800	1.067	1.451,50	1.722	-75,28
Malalak	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah	54.102	7.575	22.240	19.570	15.299,8	-71,72

Sumber. Kabupaten Agam dalam angka 2019-2023 (BPS)

Ubi Jalar

Produksi ubi jalar terbesar selama kurun waktu 5 tahun (2019 - 2023) terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 10.733 ton di Kecamatan Tilatang Kamang. Pada tahun 2023 Kecamatan Baso merupakan penyumbang produksi terbesar yaitu sebesar 6.414,15 ton, Kecamatan Tilatang Kamang sebesar 2.594,44 ton, dan Kecamatan Ampek Angkek sebesar 3.500 ton serta Kecamatan Sungai Pua sebesar 1.684,80 ton. Rincian produksi ubi jalar tahun 2019 - 2023 disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Produksi Ubi Jalar

Kecamatan	Produksi Total Ubi Jalar					Laju Pertumbuhan
	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
Tanjung Mutiara	-	-	-	-	-	0,00
Lubuk Basung	-	-	-	-	-	0,00
Tanjung Raya	-	-	-	-	-	0,00
Matur	2.897	1.390	2.015	524	-	-100,00
IV Koto	1.695	292	293	455	455,13	-73,15
Banuhampu	1.890	646	682	507	612,33	-67,60
Ampek Angkek	4.381	4.586	4.720	3.745	3.500	-20,11
Baso	7.673	7.930	6.104	6.694,60	6.414,15	-16,41
Tilatang Kamang	10.733	3.594	2.357	3.400,80	2.594,44	-75,83
Palupuh	-	-	-	-	-	0,00
Palembayan	1.200	-	-	-	-	-100,00
Sungai Pua	1.163	1.067	1.269	1.017,90	1.684,80	44,87
Ampek Nagari	-	-	-	-	-	0,00
Candung	1.463	1.101	2.350	948	842,40	-42,42
Kamang Magek	1.776	356	618	810	563,2	-68,29
Malalak	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah	34.871	20.962	20.408	18.102,30	16.666,45	-52,21

Sumber. Kabupaten Agam dalam angka 2019-2023 (BPS)

Peternakan

Populasi ternak terbesar di Kabupaten Agam adalah populasi sapi potong, kambing, dan kerbau. Pada tahun 2022 berturut-turut masing-masingnya sebanyak 31.898 ekor, 12.263 ekor, dan 12.082 ekor. Produksi daging sapi potong, kerbau, dan kambing berturut-turut masing-masingnya sebanyak 2.076.858 kg, 41.454 kg, dan 40.020 kg pada tahun 2023.

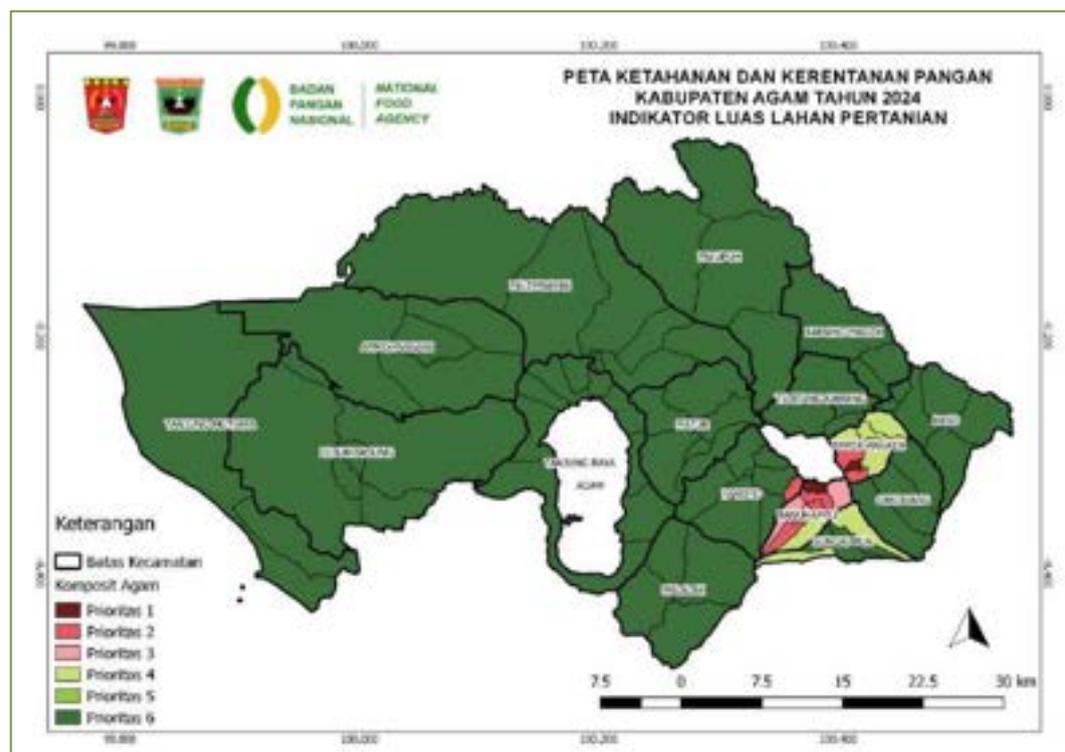
Produksi telur ayam ras sebanyak 2.181.348 kg, itik sebanyak 932.782,68 kg, ayam bukan ras sebanyak 208.786,41 kg dan puyuh sebanyak 68.740 kg pada tahun 2022. Total produksi susu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya susu sapi sebanyak 296.000 liter tahun 2022 pada tahun 2023 menjadi 232.650 liter, sedangkan produksi susu kerbau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2022 susu kerbau sebanyak 141.593 liter turun menjadi 640 liter pada tahun 2023.

Dari hasil analisis data luas lahan pertanian yang terdapat di Kabupaten Agam terhadap luas Nagari dapat di lihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.7 Sebaran rasio luas baku lahan pertanian terhadap total lahan berdasarkan prioritas

Prioritas	Rasio Luas Lahan	Jumlah Nagari	Persentase
1	$\leq 0,02523$	2	2,44
2	$> 0,0253 - 0,0399$	5	6,10
3	$> 0,0399 - 0,0525$	3	3,66
4	$> 0,0525 - 0,0748$	7	8,54
5	$> 0,0748 - 0,0900$	0	0,00
6	$> 0,0900$	65	79,27

Dari 82 nagari di Kabupaten Agam, 2 nagari masuk dalam prioritas 1 (2,44 %), 5 nagari prioritas 2 (6,10 %) dan 3 nagari prioritas 3 (3,66 %).



2.2 Jumlah Prasarana dan Sarana Penyedia Pangan

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di nagari. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan

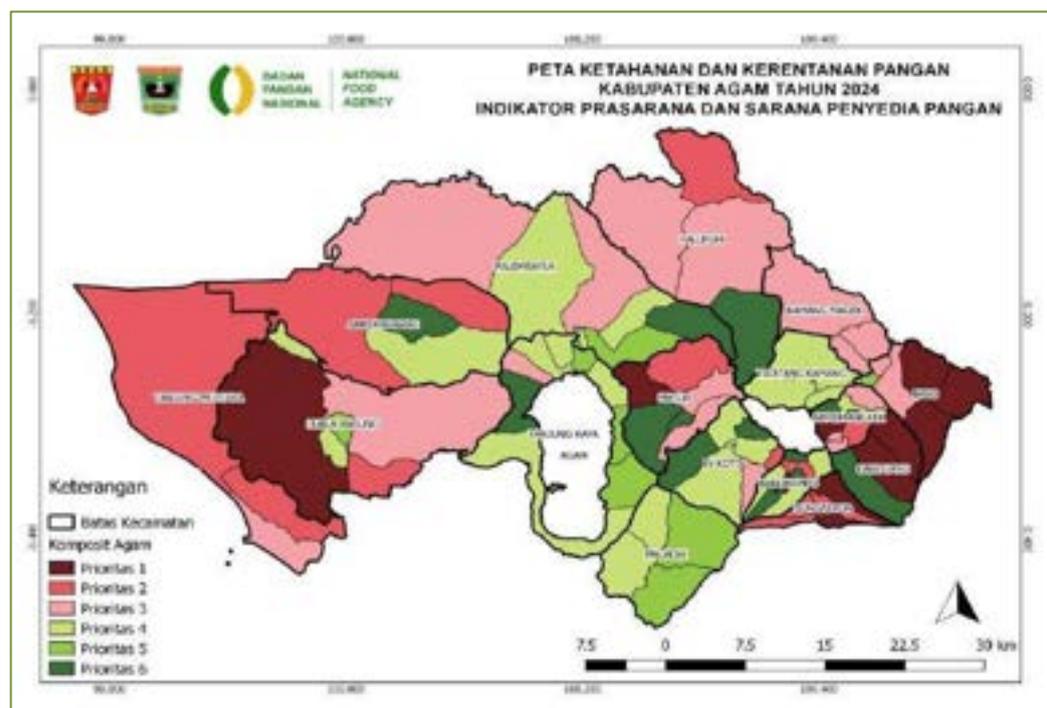
prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di nagari maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di nagari tersebut.

Tabel 2.8. Data sarana prasarana ekonomi berdasarkan kecamatan

No	Kecamatan	Sarana Pertanian	Sarana Ekonomi	Jumlah	Rasio
1	Tanjung Mutiara	28	380	408	4,77
2	Lubuk Basung	53	1.095	1148	5,45
3	Tanjung Raya	84	778	862	8,96
4	Matur	24	340	364	7,40
5	IV Koto	35	537	572	8,60
6	Banuhampu	12	702	714	7,41
7	Ampek Angkek	58	614	672	5,92
8	Baso	70	320	390	4,12
9	Tilatang Kamang	30	674	704	7,48
10	Palupuh	49	107	156	4,02
11	Palembayan	155	436	591	6,65
12	Sungai Pua	7	221	228	3,30
13	Ampek Nagari	17	395	412	5,40
14	Candung	133	211	344	5,34
15	Kamang Magek	53	270	323	5,80
16	Malalak	13	223	236	8,80
Kabupaten Agam		821	7303	8124	6,12

Sumber. Podes 2021

Dari 82 nagari di Kabupaten Agam, 11 nagari masuk dalam prioritas 1 (13,41 %), 13 nagari prioritas 2 (15,85%) dan 18 nagari prioritas 3 (21,95 %).



Tabel 2.9 Sebaran rasio Sarana Pangan terhadap Rumah Tangga berdasarkan prioritas

Prioritas	Rasio Sarana Pangan	Jumlah Nagari	Persentase
1	$\leq 0,0348$	11	13,41
2	$> 0,0348 - 0,0427$	13	15,85
3	$> 0,0427 - 0,0627$	18	21,95
4	$> 0,0627 - 0,0864$	20	24,39
5	$> 0,0864 - 0,1075$	8	9,76
6	$> 0,1075$	12	14,63

2.3 Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Agam dari tahun 2020-2022 mencapai 0,99% (Proyeksi penduduk 2020-2035 berdasarkan data SP 2020) per tahun sementara pertumbuhan produksi padi dan jagung mencapai -16,91% dan -12,1%. Rata-rata kepemilikan lahan sawah petani di Kabupaten Agam adalah 0,25 ha. Rasio lahan sawah dibandingkan lahan total adalah sebesar 11,60, sementara itu laju konversi lahan sebesar -3,47%. Rasio sarana ekonomi penyedia pangan pada prioritas 1-3 mencapai 51,21%. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

Strategi untuk meningkatkan Ketersediaan Pangan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, terdapat beberapa strategi pemerintah dalam peningkatan ketersediaan pangan melalui:

- a. Penganekaragaman pangan.
- b. Peningkatan produksi bibit dan benih dalam negeri.
- c. Pembinaan petani dalam pembudidayaan bibit dan benih.
- d. Bantuan pemasaran.
- e. Pemberian subsidi untuk benih dan bibit.
- f. Penanggulangan krisis pangan tersebut meliputi kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah, mobilisasi cadangan pangan masyarakat, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan/atau menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan.

Sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Agam 2021 – 2026, sektor pertanian, yaitu:

- a. Penyediaan infrastruktur pendukung seperti jalan pertanian, irigasi
- b. Optimasi lahan dengan pengendalian alih fungsi lahan dan pemanfaatan lahan terlantar
- c. Penguatan kelembagaan seperti kelompok tani
- d. Penyediaan teknologi dan informasi dan jaringan untuk mendukung akses pemasaran dan sarana produksi
- e. Fasilitasi pemasaran dan akses modal
- f. Fasilitasi penyediaan teknologi tepat guna dan teknologi pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah
- g. Fasilitasi penyediaan sarana prasarana produksi, pengolahan dan pemasaran.

Serta beberapa program yang terkait dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, yaitu:

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian khususnya padi, jagung, cabe, dan bawang merah.
- b. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor peternakan.
- c. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor perkebunan.
- d. Pengendalian dan penanggulangan bencana OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan pengendalian penyakit hewan menular.



Dinas Pertanian Agam melalui rencana strategis periode 2021 – 2026 telah menyusun beberapa strategi terkait dalam peningkatan ketersediaan pangan. Strategi tersebut adalah:

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan (sereal, aneka kacang dan umbi)
- b. Peningkatan penerapan teknologi pertanian tepat guna
- c. Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan
- d. Peningkatan swasembada pangan dan daging berkelanjutan
- e. Perlindungan sumber daya lahan, air irigasi, sarana dan kelembagaan
- f. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur pertanian
- g. Peningkatan efisiensi, kualitas, jumlah olahan produk pertanian dan pemasaran hasil
- h. Peningkatan mutu hasil, pengembangan pengelolaan pasca panen, promosi dan pemasaran.
- i. Memacu perkembangan kawasan pertanian dan peternakan yang terintegrasi

BAB 3

ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN



Keterjangkauan terhadap pangan merupakan salah satu dari 3 pilar ketahanan pangan. Keterjangkauan pangan berhubungan dengan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia secara fisik di suatu daerah, akan tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: i) **akses fisik**: infrastruktur pasar, akses untuk mencapai pasar dan fungsi pasar; ii) **akses ekonomi**: kemampuan keuangan untuk membeli makanan yang cukup dan bergizi; dan/atau iii) **akses sosial**: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan mekanisme dukungan informal seperti barter, meminjam atau adanya program dukungan sosial.

1.1. Penduduk dengan tingkat kesejahteraan Terendah

Penghidupan

Kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan sebagian besar ditentukan oleh ketahanan strategi penghidupan dan peluang kerja di tingkat daerah dan lokal. Strategi penghidupan di definisikan sebagai kemampuan, modal / aset - alam, fisik, manusia, ekonomi dan sosial - dan kegiatan yang digunakan oleh suatu rumah tangga untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan.

Strategi penghidupan rumah tangga bervariasi dan dapat mencakup pekerjaan, baik disektor formal maupun informal. Data lapangan kerja formal tersedia secara triwulan melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Sedangkan data pekerjaan informal tidak dipantau secara periodik meskipun terdapat keyakinan bahwa hal itu memberikan kontribusi besar terhadap strategi penghidupan rumah tangga. Pada tahun 2023, angkatan kerja mencapai 295.554 orang, mengalami peningkatan sebanyak 25.754 ribu orang dalam kurun waktu setahun dibanding Angkatan Kerja 2022 sebanyak 269.800. Berdasarkan identifikasi di Agam pada 2023, sebanyak 90.543 ribu orang (32,23 persen) bekerja pada kegiatan formal dan 190.359 ribu orang (67,77 persen) bekerja pada kegiatan informal.

Ketenagakerjaan

69,16 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Agam pada tahun 2023 merupakan angkatan kerja, 4,96 persen di antaranya merupakan pengangguran (14.652 jiwa). Sebanyak 79,6 persen pengangguran berpendidikan SMA ke atas. Sebanyak 29,58 persen penduduk yang bekerja di Kabupaten Agam hanya memiliki ijazah tertinggi yang ditamatkan setingkat SD dan tidak tamat SD, hampir menyamai persentase pekerja dengan pendidikan tertinggi di level SMA sederajat yaitu sebanyak 32,45 persen. Berdasarkan status pekerjaan, sebanyak 31,09 persen penduduk berusaha sendiri, 32,81 persen sebagai buruh/karyawan, dan 5,42 persen sebagai pekerja keluarga/buruh tidak dibayar (BPS, 2024 Kabupaten Agam Dalam Angka).

Selama tahun 2023, tercatat sebanyak 1.342 jiwa laki-laki dan 1.600 jiwa perempuan yang terdaftar mencari kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam. 465 jiwa diantaranya merupakan tamatan SMA sederajat. Sebagian besar pencari kerja berada pada rentang usia 20-29 tahun, yaitu sebanyak 1.464 jiwa (Dinas PerindagNaker).

Kemiskinan

Secara global, seseorang yang hidup di bawah ambang batas US\$ 1,25 – *Purchasing Power Parity* (PPP) Bank Dunia per hari dikategorikan sebagai penduduk miskin. PPP ditentukan menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Di Agam, dengan garis kemiskinan sebesar Rp 530.290/kapita/bulan pada Tahun 2023, terdapat sebesar 33,41 ribu jiwa di Kabupaten Agam yang dinyatakan miskin atau setara dengan 6,60 persen penduduk Kabupaten Agam. Dengan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,75 poin dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,13 poin. (BPS, 2024 Kabupaten Agam Dalam Angka).

Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi ketahanan pangan (IKP, 2022). Kemiskinan menjadi faktor utama yang menyebabkan kerentanan pangan di suatu wilayah. Jika harga pangan tidak berbanding lurus dengan pendapatannya maka keluarga miskin akan semakin tertekan, sehingga akan berpengaruh ke kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Tabel 3.1 Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Agam

Keterangan	2019	2020	Tahun 2021	2022	2023
Persentase penduduk miskin	6,75	6,75	6,85	6,22	6,6

Sumber: Kabupaten Agam Dalam Angka, BPS 2024



Tabel 3.2 Persentase Penduduk pada Desil 1

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Tanjung Mutiara	2.480	34.162	7,26
2	Lubuk Basung	4.839	84.137	5,75
3	Tanjung Raya	2.041	30.506	6,69
4	Matur	1.590	38.453	4,13
5	IV Koto	3.081	19.649	15,68
6	Banuhampu	1.938	26.592	7,29
7	Ampek Angkek	771	10.720	7,19
8	Baso	1.532	38.528	3,98
9	Tilatang Kamang	1.516	27.612	5,49
10	Palupuh	2.280	45.377	5,02
11	Palembayan	2.706	25.717	10,52
12	Sungai Pua	704	37.838	1,86
13	Ampek Nagari	3.529	37.594	9,39
14	Candung	922	22.244	4,14
15	Kamang Magek	843	35.491	2,38
16	Malalak	282	15.503	1,82
Total		31.054	530.123	5,86

Sumber: Data P3KE desil 1

Tabel 3.3 Persentase Penduduk pada Desil 1 persentil 1

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tingkat Kesejahteraan Terendah	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Tanjung Mutiara	289	34.162	0,85
2	Lubuk Basung	579	84.137	0,69
3	Tanjung Raya	167	30.506	0,55
4	Matur	145	38.453	0,38
5	IV Koto	447	19.649	2,27
6	Banuhampu	172	26.592	0,65
7	Ampek Angkek	48	10.720	0,45
8	Baso	97	38.528	0,25
9	Tilatang Kamang	71	27.612	0,26
10	Palupuh	369	45.377	0,81
11	Palembayan	262	25.717	1,02
12	Sungai Pua	48	37.838	0,13
13	Ampek Nagari	492	37.594	1,31
14	Candung	50	22.244	0,22

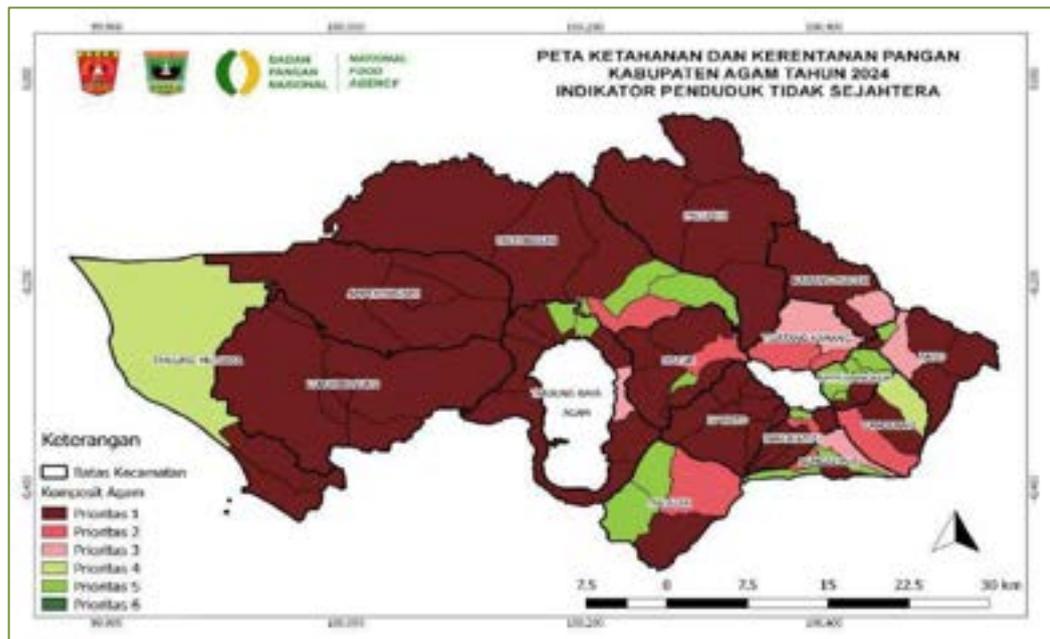
15	Kamang Magek	87	35.491	0,25
16	Malalak	17	15.503	0,11
Total		3.340	530.123	0,63

Sumber. Data P3KE desil 1 persentil 1

Di Indonesia garis kemiskinan ekstrem ditetapkan oleh BPS. Rilis Data Kemiskinan Ekstrem dikeluarkan secara resmi oleh KEMENKO PMK, melalui web <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/>. Kemiskinan Ekstrem terletak pada Presentil satu dalam Desil Satu Data P3KE. Pada tingkat nagari berdasarkan data Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2023, terdapat 51 nagari yang memiliki rasio rumah tangga dengan dengan tingkat kesejahteraan terendah diatas 0,0027 (62,20%) Prioritas 1, sebanyak 8 nagari (9,76%) masuk prioritas 2, dan 5 nagari (6,10%) masuk Prioritas 3. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 64 nagari tersebut.

Tabel 3.4 Sebaran nagari dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range Tidak Sejahtera	Jumlah Nagari	Persentase
1	$\geq 0,0026$	51	62,20
2	$0,0015 < 0,0026$	8	9,76
3	$0,0008 < 0,0015$	5	6,10
4	$0,0003 < 0,0008$	2	2,44
5	$0,0000 < 0,0003$	16	19,51
6	$< 0,0000$	0	0,00



1.2. Akses Penghubung

Infrastruktur transportasi dan gudang penyimpanan adalah hal penting dalam ketahanan pangan dan gizi. Keseluruhan rantai pasokan pangan membutuhkan infrastruktur udara, pelabuhan dan jalan yang baik, untuk mengangkut bahan pangan tepat waktu dengan biaya yang efektif. Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah di Kabupaten Agam juga menjadi faktor pendukung utama peningkatan produktivitas sektor pertanian, khususnya yang terkait dengan biaya transportasi.

Terdapat 2.021,72 km jalan di Kabupaten Agam pada tahun 2022 dimana sepanjang 138,56 km merupakan jalan negara yang berstatus baik dengan permukaan hotmix; 188,53 km jalan provinsi yang keseluruhannya telah di hotmix; dan berstatus baik dan 1.694,63 km sisanya merupakan jalan kabupaten dengan 18,09 persennya masih kerikil dan tanah selain itu 8,15 persen jalannya masih berstatus rusak berat. Kabupaten Agam dengan kondisi geografis yang dilalui oleh banyak sungai dan anak sungai, membutuhkan jembatan sebagai penghubung satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dari catatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, tercatat sebanyak 310 jembatan di Kabupaten Agam, yang tersebar di semua kecamatan yang ada. Kecamatan Lubuk Basung merupakan kecamatan yang memiliki jumlah jembatan terbanyak yaitu sebanyak 68 jembatan, diikuti oleh Kecamatan Ampek Nagari dengan 32 jembatan (BPS, 2024, Kabupaten Agam Dalam Angka).

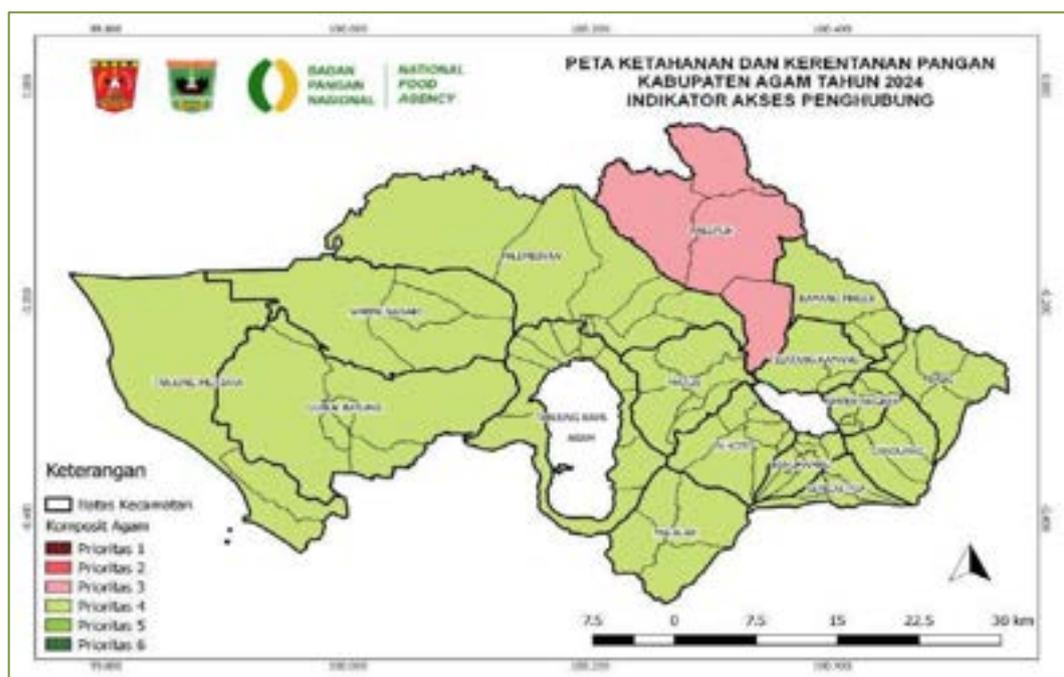
Pemerintah Kabupaten Agam berupaya membangun jaringan jalan berkualitas tinggi yang dapat mengurangi resiko biaya perdagangan dan meningkatkan akses ke pasar. Pengembangan sarana transportasi dan gudang penyimpanan dapat menurunkan harga pangan, sekaligus mendukung peningkatan pendapatan petani dengan mengurangi biaya-biaya terkait lainnya. Selain memastikan rantai pasokan pasar berjalan dengan baik, akses jalan juga dapat meningkatkan investasi antar sektor dan meningkatkan akses pelayanan, serta berkontribusi terhadap standar kehidupan secara menyeluruh, khususnya untuk daerah pedesaan. Tersedianya infrastruktur yang handal dan berkualitas memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui dampak positif terhadap produktivitas, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan baik disektor pertanian maupun non pertanian. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dapat menjangkau petani yang lebih terpencil serta memberikan bantuan teknis dan informasi untuk meningkatkan produksi. Akses pendidikan dapat ditingkatkan karena murid-murid mempunyai kesempatan untuk melakukan perjalanan menuju sekolah yang lebih jauh dan guru-guru lebih bersemangat untuk mengajar di sekolah terpencil, yang pada gilirannya dapat meningkatkan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Masyarakat pedesaan juga dapat menjangkau fasilitas kesehatan yang lebih baik.

Tabel 3.5 Panjang Jalan dan Jenis Jalan

No	Kecamatan	Panjang Jalan (km)	Jenis Permukaan Jalan terluas	Dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih
1	Tanjung Mutiara	213,50	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
2	Lubuk Basung	300,63	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
3	Tanjung Raya	103,80	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
4	Matur	69,35	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
5	IV Koto	54,75	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
6	Banuhampu	59,00	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
7	Ampek Angkek	82,10	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
8	Baso	107,65	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
9	Tilatang Kamang	115,15	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
10	Palupuh	101,65	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
11	Palembayan	164,60	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
12	Sungai Pua	48,50	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
13	Ampek Nagari	104,20	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
14	Candung	85,54	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
15	Kamang Magek	63,15	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
16	Malalak	20,75	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
Total		1.694,32	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun

Sumber. BPS,2024 Kabupaten Agam Dalam Angka

Berdasarkan data BPS, di Kabupaten Agam jalan dapat dikelompokkan sebagai berikut Jalan tanah 155,07 km, jalan kerikil 151,57 km, jalan Cor beton 373,92 km dan hotmix 1.014,07 km. Dengan status Jalan negara 138,56 km, jalan provinsi 188,53 km dan jalan kabupaten 1..014,07 km. Semua nagari memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun. Hampir semua nagari bisa dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, longsor, pasang, dll) yaitu nagari yang terdapat di Kecamatan Palupuh.



1.3. Strategi Peningkatan Keterjangkauan Pangan

Strategi Pengurangan Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Agam memiliki strategi-strategi seperti yang termuat dalam RPJMD 2021 – 2026, diantaranya:

- a. Meningkatkan kinerja lapangan usaha yang dominan diusahakan masyarakat
 - Meningkatkan kualitas manajemen Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang memiliki kemampuan dan keberdayaan setara sosial maupun secara ekonomi
 - Meningkatkan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan.
- b. Meningkatkan perlindungan kepada masyarakat penyandang masalah sosial

- c. Meningkatkan infrastruktur dasar pendukung kegiatan ekonomi masyarakat
- d. Meningkatkan konektivitas antar kawasan
 - Strategi peningkatan kondisi jalan dan jembatan
 - Strategi meningkatkan jaringan dan layanan transportasi umum
 - Strategi peningkatan layanan jaringan internet
- e. Meningkatkan realisasi investasi
- f. Meningkatkan daya saing tenaga kerja

Selain infrastruktur, adaptasi terhadap anomali iklim (*Climate Change Adaptation*) akan menjadi salah satu faktor kunci untuk menjamin kesinambungan perbaikan akses pangan dan penghidupan rumah tangga yang miskin ataupun rentan. Petani kecil harus terlindungi dari besarnya peluang gagal panen yang disebabkan adanya anomali iklim melalui inisiatif perlindungan yang inovatif.

BAB 4

ASPEK PEMANFAATAN PANGAN



Pilar ketiga dari ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: 1. pemanfaatan pangan yang bisa diakses oleh rumah tangga; dan 2. kemampuan individu untuk menyerap zat gizi – pemanfaatan makanan secara efisien oleh tubuh.

Aspek pemanfaatan pangan tergantung pada: i) fasilitas penyimpanan dan pengolahan makanan yang dimiliki oleh rumah tangga; ii) pengetahuan dan praktek yang berhubungan dengan penyiapan makanan, pemberian makanan untuk balita dan anggota keluarga lainnya yang sedang sakit atau sudah tua yang dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan ibu atau pengasuh serta adat/kepercayaan; iii) distribusi makanan dalam anggota keluarga; dan iv) kondisi kesehatan masing-masing individu yang mungkin menurun karena penyakit, kebersihan, air dan sanitasi yang buruk serta kurangnya akses ke fasilitas dan pelayanan kesehatan.

1.1. Akses terhadap air bersih

Akses terhadap air bersih sangat berperan penting dalam ketahanan pangan Daerah. Akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum sangat penting dalam mengurangi masalah penyakit khususnya diare, sehingga dapat memperbaiki status gizi melalui peningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Upaya peningkatan akses rumah tangga dengan akses air bersih di Kabupaten Agam sesuai dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat yaitu melakukan pemicuan lima pilar STBM, Edukasi, advokasi dan koordinasi percepatan stop buang air besar sembarangan, peningkatan akses rumah tangga dengan akses sarana air bersih yang memenuhi syarat kesehatan dan pemberdayaan kader untuk implementasi lima pilar STBM.

Pelanggan air bersih di Agam sebanyak 15.473 pelanggan. Secara umum tentang air minum mencatat, di Kabupaten Agam, ada 10,93 persen rumah tangga yang menggunakan air perpipaan PDAM sebagai sumber air minum. Di sisi lain, ada 75,69 persen rumah tangga yang memanfaatkan sumur bor/pompa, sumur gali baik yang terlindungi maupun tidak sebagai sumber air minum.

Tabel. 4.1 Rumah tangga tanpa akses air bersih

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih	Rasio
1	Tanjung Mutiara	8.549	0	100
2	Lubuk Basung	21.055	0	100
3	Tanjung Raya	9.623	0	100
4	Matur	4.917	0	100
5	IV Koto	6.655	0	100
6	Banuhampu	9.642	0	100
7	Ampek Angkek	11.356	0	100
8	Baso	9.469	0	100
9	Tilatang Kamang	9.408	0	100
10	Palupuh	3.880	0	100
11	Palembayan	8.882	0	100
12	Sungai Pua	6.910	0	100

13	Ampek Nagari	7.634	0	100
14	Candung	6.436	0	100
15	Kamang Magek	5.567	0	100
16	Malalak	2.683	0	100
Kabupaten Agam		132.666	0	100

Sumber: Data Dinas Kesehatan

Tabel 4.2 Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range Tanpa Air Bersih	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 0,2824$	0	0,00
2	$0,1824 < 0,2824$	0	0,00
3	$0,0854 < 0,1824$	0	0,00
4	$0,0406 < 0,0854$	0	0,00
5	$0,0183 < 0,0406$	0	0,00
6	$< 0,0183$	82	100,00



1.2. Akses terhadap tenaga kesehatan

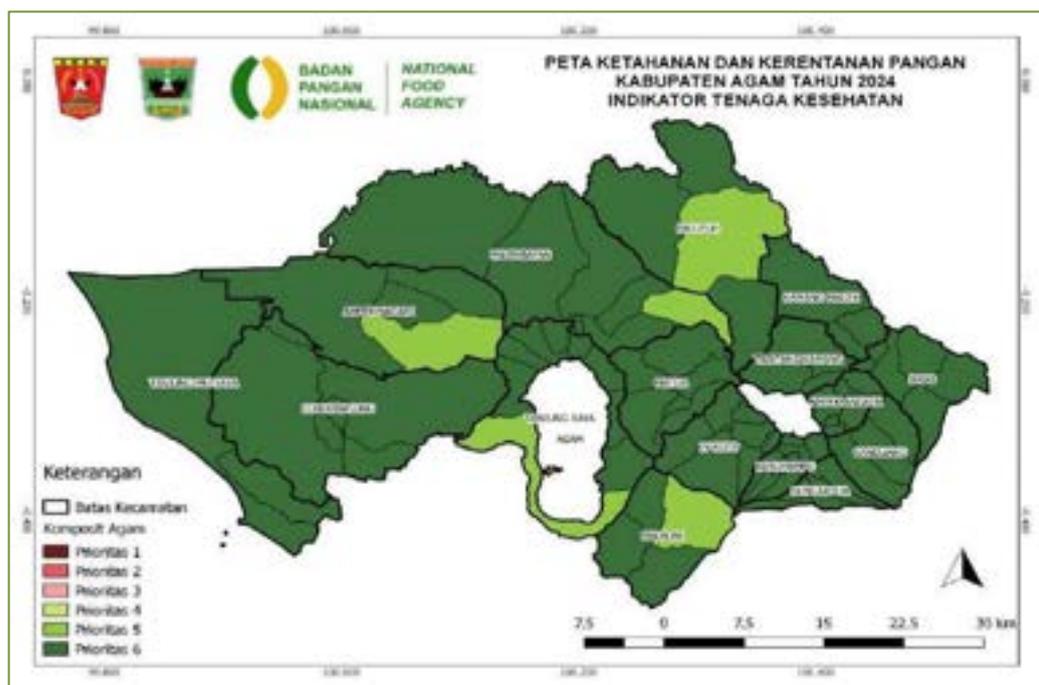
Secara keseluruhan penyediaan pelayanan kesehatan dinilai cukup baik. Kabupaten Agam memiliki 2 rumah sakit (1 milik daerah dan 1 milik swasta), dengan 879 Posyandu serta 23 Puskesmas yang terdiri dari 11 Puskesmas Rawatan dan 12 Puskesmas non Rawatan yang tersebar di 16 kecamatan, 141

puskesmas pembantu, serta sekitar 83 dokter yang merupakan gabungan dari dokter spesialis dan dokter umum. Sedangkan untuk dokter gigi, Agam memiliki 39 dokter gigi (RSUD dan Dinas Kesehatan Agam, 2023).

Untuk jumlah tenaga medis termasuk bidan dan perawat di Agam adalah sebesar 571 tenaga medis yang tersebar di seluruh fasilitas kesehatan di 16 kecamatan. Secara kualitas, berdasarkan tingkat perkembangan Posyandu dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Peningkatan kualitas Posyandu tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain meningkatnya kinerja Tim Kelompok Kerja Operasional (Pokjanel) Posyandu baik di tingkat kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan.

Tabel 4.3 Jumlah tenaga kesehatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Jumlah Tenaga Kesehatan	Rasio
1	Tanjung Mutiara	34.162	166,05	33	19,87
2	Lubuk Basung	84.137	302,22	207	68,49
3	Tanjung Raya	30.506	157,57	39	24,75
4	Matur	38.453	209,72	15	7,15
5	IV Koto	19.649	386,96	23	5,94
6	Banuhampu	26.592	1.354,24	63	4,65
7	Ampek Angkek	10.720	1.480,01	104	7,03
8	Baso	38.528	538,24	38	7,06
9	Tilatang Kamang	27.612	670,48	66	9,84
10	Palupuh	45.377	65,39	11	16,82
11	Palembayan	25.717	101,46	27	26,61
12	Sungai Pua	37.838	623,44	22	3,53
13	Ampek Nagari	37.594	113,54	25	22,02
14	Candung	22.244	491,81	26	5,29
15	Kamang Magek	35.491	223,33	39	17,46
16	Malalak	15.503	102,59	7	6,82
	Kabupaten Agam	530.123	6987,05	745	10,66



Secara umum, akses terhadap fasilitas kesehatan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya investasi pemerintah daerah untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur kesehatan. Jumlah fasilitas kesehatan meningkat dari Tahun 2019 ke tahun 2023.

Tabel 4.4 Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range Tenaga Kesehatan	Jumlah Nagari	Persentase
1	$\geq 11,4800$	0	0,00
2	$6,2500 < 11,4800$	0	0,00
3	$2,8909 < 6,2500$	0	0,00
4	$0,8194 < 2,8909$	0	0,00
5	$0,3213 < 0,8194$	5	6,10
6	$< 0,3213$	77	93,90

1.3. Dampak dari Status Kesehatan

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu: Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari -2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan

dari kurang gizi akut dan kronis); Pendek atau stunting (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan Kurus atau wasting (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Agam pada tahun 2023 sebanyak 55 balita. Jumlah penderita gizi buruk yang tinggi ditemukan di Kecamatan Ampek Angkek (11 balita), dan terendah ditemukan di Kecamatan IV Koto, Malalak dan Baso serta Palupuh (0 balita).

Tabel 4.5 Penderita Gizi Buruk 2019-2023

Kecamatan	Penderita Gizi Buruk				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tanjung Mutiara	2	3	3	2	5
Lubuk Basung	0	-	-	2	2
Tanjung Raya	1	11	19	8	3
Matur	0	4	-	-	2
IV Koto	1	3	6	1	0
Banuhampu	5	35	19	1	5
Ampek Angkek	2	39	25	21	11
Baso	0	10	8	2	0
Tilatang Kamang	1	3	5	1	3
Palupuh	3	11	7	2	0
Palembayan	1	2	5	3	5
Sungai Pua	1	8	10	1	7
Ampek Nagari	0	30	28	-	2
Candung	1	4	6	6	6
Kamang Magek	4	-	7	12	4
Malalak	0	6	14	3	0
Jumlah	22	169	162	65	55

Sumber: Kabupaten Agam Dalam Angka (BPS.2024)

Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kabupaten Agam adalah 105 jiwa. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Agam adalah 4 jiwa. Angka kematian balita tertinggi terdapat di Kecamatan Tanjung Mutiara sebanyak 13 jiwa dan terendah terdapat di Kecamatan Candung (0 jiwa). Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita	Jumlah Kematian Ibu saat Melahirkan	Total
1	Tanjung Mutiara	13	0	13
2	Lubuk Basung	12	0	12
3	Tanjung Raya	7	0	7
4	Matur	2	0	2
5	IV Koto	11	0	11
6	Banuhampu	7	1	8
7	Ampek Angkek	5	1	6
8	Baso	8	1	9
9	Tilatang Kamang	5	0	5
10	Palupuh	1	0	1
11	Palembayan	11	0	11
12	Sungai Pua	5	1	6
13	Ampek Nagari	11	0	11
14	Candung	0	0	0
15	Kamang Magek	4	0	4
16	Malalak	3	0	3
Kabupaten Agam		105	4	109

Sumber: Kabupaten Agam Dalam Angka (BPS.2024)

1.4. Strategi untuk peningkatan pemanfaatan pangan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam 2021 - 2026 menetapkan beberapa program terkait pembangunan bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

Strategi membangun sumber daya manusia

- a. Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan
- b. Pengembangan sistem penyediaan air minum dan penanganan kawasan kumuh
- c. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan tata kelola kependudukan
- d. Menurunkan jumlah PMKS dan meningkatkan perlindungan social
- e. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan kepada perempuan dan anak
- f. Meningkatkan daya saing tenaga kerja
- g. Meningkatkan ketahanan pangan daerah

BAB 5

KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT



Ketahanan pangan dirumuskan sebagai adanya keterjaminan seluruh masyarakat di dalam suatu kawasan/wilayah tercukupi kebutuhan pangannya dan gizinya yang merupakan syarat utama untuk mencapai derajat kesehatan dan kesejahteraan, yang dapat diukur melalui kecukupan/ketersediaan, stabilitas ketersediaan, dan aksesibilitas. Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan selama ini telah banyak memperlihatkan tingkat keberhasilannya, seperti ditunjukkan oleh peningkatan produksi komoditas pangan, perbaikan kualitas konsumsi masyarakat dan penurunan penduduk miskin. Namun keberhasilan tersebut belum dapat sepenuhnya mengatasi tingkat kerawanan pangan. Jumlah penduduk yang rawan pangan dan kekurangan gizi masih cukup besar sehingga perlu mendapat perhatian secara terus menerus. Kerawanan pangan merupakan masalah yang kompleks, kecukupan penyediaan pangan pada tingkat makro

tidak serta merta dapat mengatasi kerawanan pangan dan perbaikan kualitas konsumsi masyarakat. Disamping penyediaan, kerawanan pangan dan kualitas konsumsi masyarakat juga dipengaruhi oleh distribusi pangan, daya beli masyarakat, pengetahuan gizi masyarakat, dan terjadinya pemborosan pangan (Suryana, 2014). Kerawanan pangan merupakan masalah multi dimensional yang menurut Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Program (2005) didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktifitas dengan baik secara sementara maupun pada jangka panjang.

Kondisi kerawanan pangan merupakan kebalikan dari ketahanan pangan. Indikator pencapaian ketahanan pangan terdiri 2 (dua) indikator yaitu indikator proses dan indikator dampak. Indikator proses ditunjukkan oleh ketersediaan dan akses pangan. Indikator ketersediaan berkaitan dengan produksi pertanian, iklim, akses terhadap sumberdaya alam, pengembangan institusi, pasar. Sedangkan indikator akses pangan meliputi pendapatan, akses terhadap modal. Indikator dampak terdiri dari dua yaitu dampak secara langsung dan tidak langsung. Dampak secara langsung meliputi konsumsi, frekuensi pangan, status gizi, sedangkan dampak secara tidak langsung meliputi penyimpanan pangan.

1.1. Kondisi Ketahanan Pangan

Banyak faktor dapat mempengaruhi kerentanan rumah tangga terhadap kerawanan pangan. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menurut keterkaitannya dengan tiga dimensi ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan serta pemanfaatan zat-zat gizi dalam pangan. Berdasarkan literatur yang ada, peta ini menetapkan enam indikator yang mencakup setiap tiga dimensi ketahanan pangan dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang ada. Hubungan antar indikator dan ketahanan pangan, dijelaskan secara rinci pada Bab 2 sampai 4.

Sesuai dengan kesepakatan Tim Penyusun FSVA, metodologi untuk penyusunan peringkat dan pengelompokan nagari ke dalam prioritas-prioritas pada FSVA Agam 2023 ini menggunakan metode *cut-off point* (ambang batas). Nagari-nagari diklasifikasikan dalam beberapa kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi.

Pengelompokan nagari dilakukan dengan menggunakan metode pembobotan, dimana masing-masing prioritas akan memiliki *cut-off point* (ambang batas) yang

tetap berdasarkan pembobotan pada 6 indikator kerawanan pangan krisis. Kelebihan dari metode *cut-off point* adalah dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan target kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang akan dicapai oleh pemerintah, serta memudahkan melihat trend perubahan situasi ketahanan pangan antar wilayah di Indonesia.

Tabel 5.1 Hasil Komposit Ketahanan Pangan berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Jumlah Nagari	Persentase
1	0	0,00
2	0	0,00
3	1	1,22
4	21	25,61
5	13	15,85
6	47	57,32



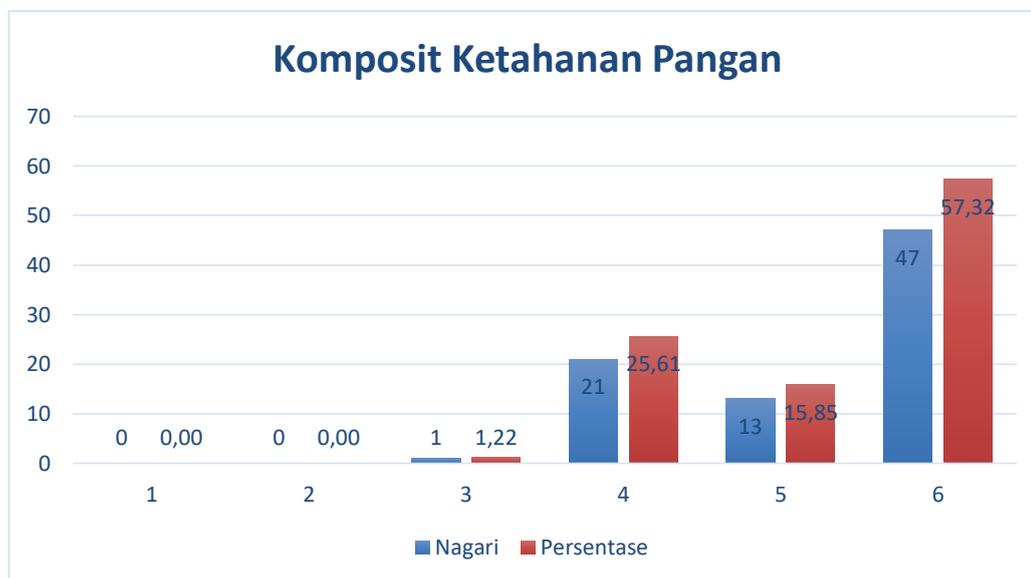
1.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan

Nagari yang masuk dalam Prioritas 3 adalah nagari-nagari yang memiliki tingkat kerentanan yang agak aman pangan dari pada nagari dengan prioritas di atasnya. Dengan demikian, Prioritas 6 adalah nagari-nagari yang cenderung sangat tahan

pangan. Nagari-nagari di Prioritas 3 cenderung sangat rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi, sedangkan nagari-nagari Prioritas 4, 5 dan 6 termasuk kategori sangat tahan pangan. Nagari dipetakan dalam gradasi warna merah untuk kelompok prioritas 1, 2 dan 3 dan gradasi warna hijau untuk Prioritas 4, 5 dan 6.

Penting untuk diingat, bahwa tidak semua rumah tangga di nagari-nagari prioritas tinggi (Prioritas 2 – 3) tergolong rawan pangan, demikian juga tidak semua rumah tangga di nagari-nagari prioritas rendah (Prioritas 4-6) tergolong tahan pangan. Tujuan dari penentuan prioritas ini adalah untuk mengidentifikasi dimanakah nagari yang lebih rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi.

Berdasarkan analisis komposit ketahanan pangan, 82 Nagari di 16 kecamatan di Kabupaten Agam dikelompokkan kedalam enam kelompok prioritas sebagai berikut: tidak ada nagari pada Prioritas 1 dan 2, 1 nagari (Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto) pada prioritas 3 (1,22 persen) dan 21 nagari pada prioritas 4 (25,61 persen), 13 nagari pada Prioritas 5 (15,85 persen), 47 nagari pada Prioritas 6 (57,32 persen). Jika dilihat dari presentasi tersebut, terdapat 1 nagari di Kabupaten Agam yang tergolong dalam nagari yang rawan pangan.



Karakteristik utama dari kerentanan terhadap kerawanan pangan di tiap nagari berbeda-beda, maka pendekatan-pendekatan khusus untuk mengurangi kerentanan juga akan berbeda-beda pada setiap nagari. Dengan menentukan karakteristik utama dari kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat nagari, maka peta ini dapat memberikan petunjuk yang lebih baik kepada para

pengambil kebijakan untuk meningkatkan efektifitas dan penentuan program ketahanan pangan.

Diseluruh nagari, karakteristik utama yang menyebabkan tingginya kerentanan terhadap kerawanan pangan adalah:

- a. Rasio Lahan Sawah sebesar 19 point
- b. Rasio Sarana Pangan sebesar 77 pont
- c. Rasio Penduduk Tidak Sejahtera 245 point
- d. Rasio Rumah Tangga tanpa akses air bersih sebesar 0 point
- e. Rasio Tenaga Kesehatan sebesar 0 point

Definisi ketahanan pangan mengalami perubahan paradigma yang signifikan pada tahun 2012, dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Dalam Undang-Undang Pangan yang baru, ketahanan pangan didefinisikan sebagai “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan“. Selanjutnya terdapat penekanan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan dengan berdasarkan asas: i) kedaulatan; ii) kemandirian; iii) ketahanan; iv) keamanan; v) manfaat; vi) pemerataan; vii) berkelanjutan; dan viii) keadilan.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pengurangan kerawanan pangan harus ditekankan pada penyelesaian akar utama penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan dengan mengacu kepada perubahan paradigma ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.



BAB 6

REKOMENDASI KEBIJAKAN



Kesimpulan

Penurunan kemiskinan yang berkesinambungan dan kemajuan program-program pemerintah lainnya telah berhasil meningkatkan ketahanan pangan di kabupaten Agam. Namun demikian, kemajuan ini memiliki resiko stagnasi jika tantangan utama tidak ditangani. Terdapat 3 faktor utama yang memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah, yaitu: i) meningkatkan akses ekonomi atau akses keuangan untuk mendapatkan pangan, terutama untuk rumah tangga miskin; ii) akselerasi intervensi untuk pencegahan kekurangan gizi. Hal ini untuk menyikapi perubahan kompleksitas masalah kedaulatan pangan, dari hanya kurang pangan ke *Multiple Burden Malnutrition*; dan iii) mengatasi kerentanan terhadap resiko perubahan iklim yang semakin meningkat.

Sub Bab dibawah ini akan menjelaskan tentang rekomendasi yang terkait dengan 3 faktor utama di atas. Ketiga faktor tersebut saling terkait dalam meletakkan aspek gizi menjadi tema sentral yang bersinggungan erat dengan kedua aspek lainnya. Hal ini mencerminkan pentingnya pengarusutamaan pendekatan yang

berbasis gizi untuk program dan kebijakan ketahanan pangan dan gizi.

Akses ekonomi

Isu kemiskinan merupakan dampak dari permasalahan pembangunan yang muncul dari berbagai bidang seperti rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, infrastruktur yang belum merata, masih tingginya penyandang masalah sosial dan tentunya kinerja ekonomi yang belum mampu memberdayakan penduduk miskin sehingga keluar dari kemiskinan, maka untuk penanggulangannya memerlukan strategi dan kebijakan yang komprehensif, terintegrasi baik antar bidang pembangunan maupun antar tingkatan lembaga pemerintahan.

Dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,60 persen pada 2023, maka program bantuan sosial dan jaring pengaman sosial menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung rumah tangga miskin dalam mendapatkan akses pangan yang memadai. Program jangka panjang juga telah dilakukan yang mencakup penguatan dan diversifikasi mata pencaharian serta perluasan infrastruktur dasar dan pelayanan. Selain itu, perlu peningkatan alokasi anggaran untuk program bantuan sosial dan reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan sensitivitas gizi dari program, maka program tersebut dapat memiliki dampak penting pada akses pangan.

Peningkatan sistem distribusi pangan terutama bagi masyarakat di wilayah daerah terpencil (khususnya di kecamatan Palupuh), dimana distribusi pangan menjadi kendala pada musim-musim tertentu, melalui perbaikan sarana prasarana utama seperti jalan dan sarana transportasi, pembangunan pasar tradisional serta memperkuat kelembagaan pasar. Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk melindungi petani produsen beras dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga pasar yang terlalu tinggi.

Tinjauan dan perbaikan insentif untuk produksi pangan, termasuk jaminan harga, subsidi dan pembatasan perdagangan, dapat membantu memastikan bahwa produksi pangan bergizi tinggi, termasuk komoditas kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan, perlu diberi prioritas yang sama seperti produksi pangan pokok. Meningkatkan produksi hasil pertanian tersebut mungkin memerlukan biaya yang lebih tinggi, sehingga diperlukan insentif bagi petani untuk menghasilkan bahan pangan yang bergizi, dimana pada gilirannya akan membuat bahan pangan tersebut kurang terjangkau bagi mereka yang berada pada risiko

gizi kurang. Keadaan ini dapat dikurangi dengan menggunakan jaring pengaman sosial yang memadai.

Dampak terhadap gizi

Meskipun telah terjadi perbaikan situasi ketahanan pangan dan gizi, tetapi masih terdapat kekurangan pada pencapaian indikator ketahanan gizi seperti terlihat pada data-data yang ada. Bahkan, kemajuan pada beberapa tujuan MDGs terkait kesehatan dan gizi telah terhenti, yaitu: (i) *stunting* yang masih cukup tinggi pada tahun 2023; (ii) angka kematian balita masih cukup tinggi.

Di Kabupaten Agam, permasalahan kekurangan gizi bukan hanya masalah orang miskin. Proporsi anak-anak Agam yang *stunting* juga cenderung lebih besar dari proporsi penduduk miskin. Untuk penduduk tidak miskin tetapi kurang gizi, hambatan untuk mencapai status yang lebih bergizi belum tentu terkait pada akses ekonomi atau program pengentasan kemiskinan pemerintah, akan tetapi juga berkaitan dengan kurangnya pemahaman terhadap praktek pola makan dan gizi yang baik serta pola asuh yang kurang tepat. Sebaliknya, untuk penduduk miskin yang kurang gizi akan menghadapi tambahan permasalahan untuk akses ekonomi dan sosial.

Pendekatan multi-sektoral untuk mengurangi dan mencegah kekurangan gizi di Kabupaten Agam sangat penting dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat serta sektor swasta. Untuk lembaga pemerintah, koordinasi lintas sektor sangat perlu ditingkatkan guna mengatasi hambatan kelembagaan dalam pembuatan kebijakan dan program pemerintah, dimana dapat memperbaiki sensitifitas gizi dari program kesejahteraan, pertanian dan atau program perubahan iklim yang ada.

Ada banyak peluang untuk meningkatkan sensitifitas gizi dalam program-program pertanian. Program penyuluhan pertanian dapat lebih diarahkan kepada memberi masukan dan membantu petani dalam budidaya, penanganan pasca panen dan penyimpanan berbagai tanaman pangan bukan hanya di lahan pertanian tetapi juga dipekarangan rumah, terutama untuk kecamatan dan nagari yang termasuk rentan terhadap kondisi rawan pangan. Sektor pertanian akan mendapat manfaat dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang lebih diarahkan ke spesies dan varietas tanaman pangan yang relatif memiliki nilai gizi tinggi. Program-program ini dapat juga bekerjasama dengan kelompok tani yang telah ada untuk memberikan pengetahuan tentang kesehatan dan gizi kepada masyarakat. Melibatkan kaum perempuan secara lebih luas, dimana

perempuan bertanggung jawab dalam produksi pangan, pembelian, persiapan, distribusi dalam keluarga dan pemberian makanan, terutama pada masyarakat petani baik dalam desain program pertanian maupun sebagai peserta program, juga berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi.

Di luar program-program pemerintah, peran sektor swasta dalam meningkatkan status gizi di Agam semakin penting mengingat sektor swasta dapat meningkatkan ketersediaan bahan pangan olahan yang umumnya tinggi lemak dan gula - dengan harga yang relatif murah. Berkaitan dengan pendidikan, keterjangkauan dan peningkatan kesadaran tentang makanan bergizi dan seimbang harus menjadi strategi utama untuk mengatasi kesenjangan gizi di Agam. Untuk melengkapi strategi program gizi tersebut, pemerintah provinsi dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk membuat dan mendistribusikan pangan bergizi dengan harga terjangkau. Program jaring pengaman sosial dan program pencegahan gizi juga dapat berperan penting dalam merangsang sektor swasta untuk memproduksi makanan bergizi yang sesuai standar internasional yang dirancang khusus untuk kelompok rentan. Selain itu, perlunya menambahkan komponen gizi ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH), misalnya dalam bentuk kupon gizi untuk membantu memberikan insentif untuk gizi yang baik bagi rumah tangga miskin.

Perubahan iklim

Perubahan iklim tetap menjadi ancaman besar bagi ketahanan pangan dan gizi, terutama bagi rumah tangga yang mata pencahariannya bergantung pada produksi pertanian. Mengingat iklim makin tidak menentu, antisipasi dampak perubahan iklim seperti penyimpangan curah hujan, peningkatan frekuensi dan intensitas perubahan iklim, peningkatan resiko hama tanaman yang berdampak negatif ke petani, membuat sulit bagi para petani untuk memperkirakan kalender pertanian. Hal ini berdampak pada rendahnya produksi dan produktifitas tanaman yang pada akhirnya akan mengganggu mata pencaharian petani secara keseluruhan.

Agam terus menghadapi bencana, tidak hanya dalam skala besar dan tiba-tiba (*sudden onset*) tapi juga bencana yang dapat diprediksi (*slow onset*) yang terkait dengan perubahan iklim. Misalnya, kekeringan, banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh curah hujan ekstrim yang berdampak terhadap memburuknya kerawanan pangan yang ada, sehingga membutuhkan tanggap darurat yang menyerap sumber daya keuangan dan sumber daya manusia baik di tingkat lokal

kabupaten maupun di tingkat provinsi.

Keberlanjutan pasokan air dan jasa lingkungan lainnya merupakan hal penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal dalam beradaptasi dengan perubahan iklim. Pengelolaan air dapat diperkuat melalui peningkatan perencanaan tata ruang dan sistem penggunaan lahan, pengelolaan konservasi dan kawasan ekosistem penting, rehabilitasi ekosistem yang terdegradasi, dan percepatan pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pertanian (termasuk irigasi, bendungan, dam) dengan menggunakan teknologi iklim yang sudah terbukti. Peluang lainnya termasuk meningkatkan sistem peringatan dini untuk bencana yang terprediksi (*slow-onset*) dan mendadak (*sudden-onset*) terkait dengan perubahan iklim, menciptakan program insentif untuk penelitian dan pengembangan daya tahan tanaman terhadap kondisi iklim dan hama tanaman yang baru.

Akses ekonomi, dampak gizi dan sensitifitas terhadap perubahan iklim merupakan 3 faktor utama yang mempengaruhi pencapaian ketahanan pangan dan gizi di Agam. Dengan kondisi seperti sekarang ini, melambatnya pertumbuhan ekonomi dan ketidakpastian iklim, maka Kabupaten Agam akan menghadapi tantangan yang besar. Hal ini membutuhkan program-program pemerintah yang lebih fokus pada pengurangan kemiskinan, program gizi-sensitif, diversifikasi pangan dan strategi adaptasi iklim. Melalui peningkatan dialog dan koordinasi lintas sektor, serta lebih banyak pada upaya untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan upaya sektor publik dan swasta, Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, setara, sejahtera dan tahan terhadap dampak yang disebabkan oleh bencana alam dan bencana lainnya.

Implikasi kebijakan

Untuk menjawab 3 (tiga) tantangan diatas yaitu akses ekonomi, gizi dan iklim, maka Pemerintah Agam perlu untuk melakukan:

- 1 Untuk menjawab masalah kekurangan gizi (*undernutrition*), maka pemerintah perlu melakukan penyesuaian arah dan fokus kebijakan dari ketahanan pangan menuju Ketahanan Pangan dan Gizi, terutama di kecamatan-kecamatan atau nagari yang rentan atas kondisi rawan pangan. Pemerintah sebaiknya melakukan kaji ulang fokus pangan pokok, seperti dengan memasukkan pangan pokok lokal (umbi-umbian, jagung konsumsi, ikan, sayuran, buah lokal).
- 2 Pemerintah Kabupaten Agam dapat melakukan integrasi kebijakan pangan

dan gizi, seperti: kebijakan pertanian sensitif gizi dan kesehatan, kebijakan gizi dan kesehatan berbasis pangan lokal, kebijakan perdagangan dan industri sensitif pangan dan gizi.

- 3 Dukungan dari tingkat nasional, Pemerintah Pusat dapat melakukan sistem pangan terpadu, melalui:
 - a. Pendekatan multi dimensi; (i) meningkatkan produksi pangan primer; (ii) mengurangi kehilangan pasca panen dan konsumsi; (iii) pengembangan budaya konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman.
 - b. Pengembangan sistem pertanian ekologis multi komoditas, seperti Integrasi Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Ternak Ikan Perhutanan.
 - c. Pengembangan rantai pasok pangan berbasis IPTEK dan sensitif gizi.

Tantangan ketahanan pangan

Di Kabupaten Agam, terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan utama bagi ketahanan pangan, diantaranya adalah:

- Laju pertumbuhan penduduk di Agam dari tahun 2020 ke 2022 mencapai 0,99 persen (BPS, 2023), sementara pertumbuhan produksi tanaman dalam lima tahun terakhir mencapai -16,91 persen untuk padi dan -12,10 persen untuk jagung. Walaupun demikian, fluktuasi curah hujan dan terus berkurangnya lahan pertanian yang tersedia merupakan faktor risiko utama.
- Konversi dari lahan pertanian menjadi non-pertanian juga merupakan suatu hal yang wajib menjadi perhatian pemerintah. Walaupun dalam lima tahun terakhir terjadi perubahan signifikan terkait jumlah lahan pertanian, namun tingginya kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal serta kebutuhan lahan untuk perumahan dapat mengurangi luasan lahan pertanian dari tahun ke tahun.
- Rata rata luas lahan yang dikuasai per rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Agam pada tahun 2023 berdasarkan data Sensus Pertanian 2023 adalah sekitar **0,72** hektar per rumah tangga petani (ST 2023). Dengan luas lahan usaha tani seperti ini, meski produktivitas per luas lahan tinggi tetap merupakan tantangan besar bagi Pemerintah kabupaten dalam mengamankan produksi padi/beras untuk mendukung ketahanan pangan daerah, dan peningkatan daya saing komoditas pertanian.
- Selain itu, tingginya presentasi petani gurem di Agam beresiko mempengaruhi

ketahanan pangan di Agam. Berdasarkan ST 2023 hampir 70,20 persen (57.926 rumah tangga) dari 82.505 rumah tangga usaha pertanian di Agam merupakan rumah tangga petani gurem (BPS, 2023).

- Faktor lain yang terus menjadi penghambat pengembangan dibidang pertanian adalah:
 - o Menurunnya daya dukung sumber daya alam, lingkungan yang dieksploitasi berlebihan, anomali iklim dan, degradasi lahan.
 - o Belum optimalnya infrastruktur pertanian.
 - o Tingkat kehilangan hasil (*losses*) yang masih cukup tinggi dan masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian terhadap produk impor.
 - o Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usahatani.
 - o Belum optimalnya kelembagaan petani.
 - o Relatif terbatasnya tingkat pendidikan petani.

Catatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Kabupaten Agam telah memiliki 92 nagari. Namun dalam analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan pada tahun 2023 ini belum dapat ditampilkan untuk 92 nagari karena tidak tersedianya data yang mewakili masing-masing indikator untuk 10 nagari hasil pemekaran. Sebagai kesimpulan untuk nagari hasil pemekaran, dapat diasumsikan diwakili oleh nagari induk.

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Durian Kapeh Darussalam Pemekaran sebagian wilayah Nagari Tiku Utara
2. Dalko Pemekaran sebagian wilayah Nagari Tanjung Sani
3. Sungai Cubadak Pemekaran sebagian wilayah Nagari Tabek Panjang
4. Koto Gadang Pemekaran sebagian wilayah Nagari Koto Tinggi
5. Nan Limo Pemekaran sebagian wilayah Nagari Nan Tujuh
6. Salareh Aia Timur Pemekaran sebagian wilayah Nagari Salareh Aia
7. Salareh Aia Utara Pemekaran sebagian wilayah Nagari Salareh Aia
8. Salareh Aia Barat Pemekaran sebagian wilayah Nagari Salareh Aia
9. Kamang Tangah Anam Suku Pemekaran sebagian wilayah Nagari Kamang Mudiak
10. Pauh Kamang Mudiak Pemekaran sebagian wilayah Nagari Kamang Mudiak



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, Kabupaten Agam dalam Angka 2024

Badan Pusat Statistik, Kecamatan dalam Angka 2024

Badan Pusat Statistik, Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023

Badan Pusat Statistik, Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Agam 2015

Badan Pangan Nasional. Petunjuk Teknis Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026

Suryana, A. 2014. Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya. Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2.:123-135

Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	Sumber	1. Luas Lahan Pertanian	2. Jumlah Sarana & Prasarana Penyedia Pangan
					Tahun	KESEPAKATAN	KESEPAKATAN
						2023	2023
					1. Data yang Dipakai di FSVA (Ha)	2. Data yang Dipakai di FSVA (Unit)	
1	Tanjung Mutiara	13.06.01	13.06.01.2001	Tiku Selatan		1336,00	191
2	Tanjung Mutiara	13.06.01	13.06.01.2002	Tiku Utara		1614,00	102
3	Tanjung Mutiara	13.06.01	13.06.01.2003	Tiku Limo Jorong		9209,29	115
4	Lubuk Basung	13.06.02	13.06.02.2001	Lubuk Basung		9297,76	612
5	Lubuk Basung	13.06.02	13.06.02.2002	Geragahan		1858,00	77
6	Lubuk Basung	13.06.02	13.06.02.2003	Kampung Pinang		421,00	101
7	Lubuk Basung	13.06.02	13.06.02.2004	Kampung Tengah		1076,00	158
8	Lubuk Basung	13.06.02	13.06.02.2005	Manggopoh		9942,24	200
9	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2001	Tanjung Sani		4793,64	137
10	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2002	Sungai Batang		2166,00	121
11	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2003	Maninjau		1375,50	82
12	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2004	Bayua		1929,00	138
13	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2006	Koto Kaciak		1622,00	77
14	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2007	Duo Koto		795,18	75
15	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2008	Koto Gadang Anam Koto		1214,50	37
16	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2009	Koto Malintang		2017,00	158
17	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2010	Paninjauan		544,00	37
18	Matua	13.06.04	13.06.04.2001	Matua Hilia		818,00	40
19	Matua	13.06.04	13.06.04.2002	Matua Mudiak		781,30	217
20	Matua	13.06.04	13.06.04.2003	Tigo Balai		1307,95	33
21	Matua	13.06.04	13.06.04.2004	Lawang		2039,80	26
22	Matua	13.06.04	13.06.04.2005	Parik Panjang		137,50	18
23	Matua	13.06.04	13.06.04.2006	Panta Pauh		429,50	30
24	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2002	Sungai Landia		1176,50	107
25	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2003	Balingka		1429,00	128
26	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2004	Koto Tuo		390,50	53
27	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2005	Guguk Tabek Sarajo		160,00	38
28	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2006	Koto Panjang		1040,00	54
29	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2007	Sianok Anam Suku		271,00	138
30	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2008	Koto Gadang		327,00	54
31	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2001	Padang Lua		169,02	181
32	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2002	Taluak Ampek Suku		108,03	136
33	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2003	Pakan Sinayan		285,02	88
34	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2004	Kubang Putihah		355,03	140
35	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2005	Ladang Laweh		215,03	53
36	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2006	Cingkariang		353,02	97

37	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2007	Sungai Tanang	124,02	19
38	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2001	Batu Taba	181,20	96
39	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2002	Biaro Gadang	565,60	236
40	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2003	Lambah	277,00	83
41	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2004	Panampung	557,20	88
42	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2005	Ampang Gadang	274,70	63
43	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2006	Pasia	57,20	42
44	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2008	Balai Gurah	392,10	64
45	Baso	13.06.08	13.06.08.2001	Koto Tinggi	1382,00	68
46	Baso	13.06.08	13.06.08.2002	Tabek Panjang	1145,00	157
47	Baso	13.06.08	13.06.08.2004	Simarasok	863,00	34
48	Baso	13.06.08	13.06.08.2005	Padang Tarok	1086,00	68
49	Baso	13.06.08	13.06.08.2006	Salo	261,00	21
50	Baso	13.06.08	13.06.08.2007	Koto Baru	165,00	42
51	Tilatang Kamang	13.06.09	13.06.09.2001	Koto Tangah	3427,80	291
52	Tilatang Kamang	13.06.09	13.06.09.2003	Gadut	2381,00	349
53	Tilatang Kamang	13.06.09	13.06.09.2004	Kapau	401,00	64
54	Palupuh	13.06.10	13.06.10.2001	Koto Rantang	2237,00	84
55	Palupuh	13.06.10	13.06.10.2002	Pasia Laweh	3387,00	56
56	Palupuh	13.06.10	13.06.10.2003	Pagadih	1933,00	18
57	Palupuh	13.06.10	13.06.10.2004	Nan Tujuh	3947,69	62
58	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2001	Baringin	685,73	74
59	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2002	Sipinang	313,00	57
60	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2003	Sungai Puar	673,00	43
61	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2004	Ampek Koto Palembang	2362,00	55
62	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2005	Tigo Koto Silungkang	2244,00	178
63	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2006	Salareh Aia	7029,00	184
64	Sungai Pua	13.06.12	13.06.12.2001	Padang Laweh	200,00	35
65	Sungai Pua	13.06.12	13.06.12.2002	Sungai Pua	818,00	114
66	Sungai Pua	13.06.12	13.06.12.2003	Batagak	541,40	41
67	Sungai Pua	13.06.12	13.06.12.2004	Batu Palano	280,00	17
68	Sungai Pua	13.06.12	13.06.12.2005	Sariak	470,80	21
69	Ampek Nagari	13.06.13	13.06.13.2001	Batu Kambing	2093,06	131
70	Ampek Nagari	13.06.13	13.06.13.2002	Sitalang	2076,00	29
71	Ampek Nagari	13.06.13	13.06.13.2003	Bawan	11627,00	203
72	Ampek Nagari	13.06.13	13.06.13.2004	Sitanang	2534,45	49
73	Candung	13.06.14	13.06.14.2001	Candung Koto Laweh	1462,25	64
74	Candung	13.06.14	13.06.14.2002	Lasi	915,52	25
75	Candung	13.06.14	13.06.14.2003	Bukik Batabuah	967,49	255
76	Kamang Magek	13.06.15	13.06.15.2001	Magek	734,00	74
77	Kamang Magek	13.06.15	13.06.15.2002	Kamang Hilia	1297,77	80
78	Kamang Magek	13.06.15	13.06.15.2003	Kamang Mudiak	5186,08	169
79	Malalak	13.06.16	13.06.16.2001	Malalak Utara	598,79	47
80	Malalak	13.06.16	13.06.16.2002	Malalak Timur	2231,00	64
81	Malalak	13.06.16	13.06.16.2003	Malalak Selatan	1905,00	69
82	Malalak	13.06.16	13.06.16.2004	Malalak Barat	1570,00	57

VALIDASI DATA INDIKATOR AKSES PANGAN

Kabupaten : Agam

Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA-Desa) 2024

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	Sumber	3. Jumlah Pddk Tingkat Kesejahteraan Terendah	4. Desa Tanpa Akses Penghubung Memadai
					Tahun	KESEPAKATAN	KESEPAKATAN
						2023	2023
					3. Data yang dipakai di FSVA (Jiwa)	4. Data yang dipakai di FSVA	
1	Tanjung Mutiara	13.06.01	13.06.01.2001	Tiku Selatan		197	1
2	Tanjung Mutiara	13.06.01	13.06.01.2002	Tiku Utara		83	1
3	Tanjung Mutiara	13.06.01	13.06.01.2003	Tiku Limo Jorong		9	1
4	Lubuk Basung	13.06.02	13.06.02.2001	Lubuk Basung		191	1
5	Lubuk Basung	13.06.02	13.06.02.2002	Geragahan		74	1
6	Lubuk Basung	13.06.02	13.06.02.2003	Kampung Pinang		14	1
7	Lubuk Basung	13.06.02	13.06.02.2004	Kampung Tengah		20	1
8	Lubuk Basung	13.06.02	13.06.02.2005	Manggopoh		280	1
9	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2001	Tanjung Sani		57	1
10	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2002	Sungai Batang		24	1
11	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2003	Maninjau		4	1
12	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2004	Bayua		40	1
13	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2006	Koto Kaciak		20	1
14	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2007	Duo Koto		0	1
15	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2008	Koto Gadang Anam Koto		10	1
16	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2009	Koto Malintang		12	1
17	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2010	Paninjauan		0	1
18	Matua	13.06.04	13.06.04.2001	Matua Hilia		7	1
19	Matua	13.06.04	13.06.04.2002	Matua Mudiak		68	1
20	Matua	13.06.04	13.06.04.2003	Tigo Balai		20	1
21	Matua	13.06.04	13.06.04.2004	Lawang		25	1
22	Matua	13.06.04	13.06.04.2005	Parik Panjang		0	1
23	Matua	13.06.04	13.06.04.2006	Panta Pauh		25	1
24	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2002	Sungai Landia		20	1
25	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2003	Balingka		143	1
26	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2004	Koto Tuo		74	1
27	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2005	Guguk Tabek Sarajo		24	1
28	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2006	Koto Panjang		127	1
29	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2007	Sianok Anam Suku		25	1
30	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2008	Koto Gadang		34	1
31	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2001	Padang Lua		22	1
32	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2002	Taluak Ampek Suku		0	1
33	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2003	Pakan Sinayan		30	1
34	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2004	Kubang Putih		28	1
35	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2005	Ladang Laweh		12	1
36	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2006	Cingkariang		61	1

37	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2007	Sungai Tanang	19	1
38	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2001	Batu Taba	26	1
39	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2002	Biaro Gadang	0	1
40	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2003	Lambah	0	1
41	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2004	Panampung	0	1
42	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2005	Ampang Gadang	0	1
43	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2006	Pasia	0	1
44	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2008	Balai Gurah	22	1
45	Baso	13.06.08	13.06.08.2001	Koto Tinggi	35	1
46	Baso	13.06.08	13.06.08.2002	Tabek Panjang	10	1
47	Baso	13.06.08	13.06.08.2004	Simarasok	24	1
48	Baso	13.06.08	13.06.08.2005	Padang Tarok	22	1
49	Baso	13.06.08	13.06.08.2006	Salo	0	1
50	Baso	13.06.08	13.06.08.2007	Koto Baru	6	1
51	Tilatang Kamang	13.06.09	13.06.09.2001	Koto Tengah	26	1
52	Tilatang Kamang	13.06.09	13.06.09.2003	Gadut	38	1
53	Tilatang Kamang	13.06.09	13.06.09.2004	Kapau	7	1
54	Palupuh	13.06.10	13.06.10.2001	Koto Rantang	34	2
55	Palupuh	13.06.10	13.06.10.2002	Pasia Laweh	86	2
56	Palupuh	13.06.10	13.06.10.2003	Pagadih	167	2
57	Palupuh	13.06.10	13.06.10.2004	Nan Tujuh	82	2
58	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2001	Baringin	6	1
59	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2002	Sipinang	0	1
60	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2003	Sungai Puar	0	1
61	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2004	Ampek Koto Palembang	20	1
62	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2005	Tigo Koto Silungkang	169	1
63	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2006	Salareh Aia	67	1
64	Sungai Pua	13.06.12	13.06.12.2001	Padang Laweh	0	1
65	Sungai Pua	13.06.12	13.06.12.2002	Sungai Pua	20	1
66	Sungai Pua	13.06.12	13.06.12.2003	Batagak	8	1
67	Sungai Pua	13.06.12	13.06.12.2004	Batu Palano	20	1
68	Sungai Pua	13.06.12	13.06.12.2005	Sariak	0	1
69	Ampek Nagari	13.06.13	13.06.13.2001	Batu Kambing	69	1
70	Ampek Nagari	13.06.13	13.06.13.2002	Sitalang	142	1
71	Ampek Nagari	13.06.13	13.06.13.2003	Bawan	241	1
72	Ampek Nagari	13.06.13	13.06.13.2004	Sitanang	40	1
73	Candung	13.06.14	13.06.14.2001	Canduang Koto Laweh	4	1
74	Candung	13.06.14	13.06.14.2002	Lasi	26	1
75	Candung	13.06.14	13.06.14.2003	Bukik Batabuah	20	1
76	Kamang Magek	13.06.15	13.06.15.2001	Magek	22	1
77	Kamang Magek	13.06.15	13.06.15.2002	Kamang Hilia	5	1
78	Kamang Magek	13.06.15	13.06.15.2003	Kamang Mudiak	60	1
79	Malalak	13.06.16	13.06.16.2001	Malalak Utara	0	1
80	Malalak	13.06.16	13.06.16.2002	Malalak Timur	5	1
81	Malalak	13.06.16	13.06.16.2003	Malalak Selatan	12	1
82	Malalak	13.06.16	13.06.16.2004	Malalak Barat	0	1

VALIDASI DATA INDIKATOR PEMANFAATAN PANGAN
Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA-Desa)
 2024

Kabupaten : Agam

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	Sumber	5. Jumlah RT Tanpa Akses Air Bersih	6. Jumlah Tenaga Kesehatan
					Tahun	KESEPAKATAN	KESEPAKATAN
						2023	2023
					5. Data yang dipakai di FSVA (RT)	6. Data yang dipakai di FSVA (Orang)	
1	Tanjung Mutiara	13.06.01	13.06.01.2001	Tiku Selatan		0,001	7
2	Tanjung Mutiara	13.06.01	13.06.01.2002	Tiku Utara		0,001	5
3	Tanjung Mutiara	13.06.01	13.06.01.2003	Tiku Limo Jorong		0,001	21
4	Lubuk Basung	13.06.02	13.06.02.2001	Lubuk Basung		0,001	136
5	Lubuk Basung	13.06.02	13.06.02.2002	Geragahan		0,001	7
6	Lubuk Basung	13.06.02	13.06.02.2003	Kampung Pinang		0,001	14
7	Lubuk Basung	13.06.02	13.06.02.2004	Kampung Tengah		0,001	10
8	Lubuk Basung	13.06.02	13.06.02.2005	Manggopoh		0,001	40
9	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2001	Tanjung Sani		0,001	2
10	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2002	Sungai Batang		0,001	4
11	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2003	Maninjau		0,001	7
12	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2004	Bayua		0,001	8
13	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2006	Koto Kaciak		0,001	6
14	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2007	Duo Koto		0,001	3
15	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2008	Koto Gadang Anam Koto		0,001	3
16	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2009	Koto Malintang		0,001	2
17	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2010	Paninjauan		0,001	4
18	Matua	13.06.04	13.06.04.2001	Matua Hilia		0,001	3
19	Matua	13.06.04	13.06.04.2002	Matua Mudiak		0,001	5
20	Matua	13.06.04	13.06.04.2003	Tigo Balai		0,001	1
21	Matua	13.06.04	13.06.04.2004	Lawang		0,001	3
22	Matua	13.06.04	13.06.04.2005	Parik Panjang		0,001	1
23	Matua	13.06.04	13.06.04.2006	Panta Pauh		0,001	2
24	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2002	Sungai Landia		0,001	1
25	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2003	Balingka		0,001	1
26	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2004	Koto Tuo		0,001	5
27	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2005	Guguk Tabek Sarajo		0,001	8
28	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2006	Koto Panjang		0,001	2
29	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2007	Sianok Anam Suku		0,001	5
30	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2008	Koto Gadang		0,001	1
31	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2001	Padang Lua		0,001	13
32	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2002	Taluak Ampek Suku		0,001	16
33	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2003	Pakan Sinayan		0,001	3
34	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2004	Kubang Putihah		0,001	16
35	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2005	Ladang Laweh		0,001	7
36	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2006	Cingkariang		0,001	5

37	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2007	Sungai Tanang	0,001	3
38	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2001	Batu Taba	0,001	4
39	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2002	Biaro Gadang	0,001	21
40	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2003	Lambah	0,001	17
41	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2004	Panampung	0,001	14
42	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2005	Ampang Gadang	0,001	28
43	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2006	Pasia	0,001	8
44	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2008	Balai Gurah	0,001	12
45	Baso	13.06.08	13.06.08.2001	Koto Tinggi	0,001	3
46	Baso	13.06.08	13.06.08.2002	Tabek Panjang	0,001	22
47	Baso	13.06.08	13.06.08.2004	Simarasok	0,001	2
48	Baso	13.06.08	13.06.08.2005	Padang Tarok	0,001	7
49	Baso	13.06.08	13.06.08.2006	Salo	0,001	3
50	Baso	13.06.08	13.06.08.2007	Koto Baru	0,001	1
51	Tilatang Kamang	13.06.09	13.06.09.2001	Koto Tengah	0,001	33
52	Tilatang Kamang	13.06.09	13.06.09.2003	Gadut	0,001	27
53	Tilatang Kamang	13.06.09	13.06.09.2004	Kapau	0,001	6
54	Palupuh	13.06.10	13.06.10.2001	Koto Rantang	0,001	2
55	Palupuh	13.06.10	13.06.10.2002	Pasia Laweh	0,001	2
56	Palupuh	13.06.10	13.06.10.2003	Pagadih	0,001	3
57	Palupuh	13.06.10	13.06.10.2004	Nan Tujuh	0,001	4
58	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2001	Baringin	0,001	1
59	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2002	Sipinang	0,001	1
60	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2003	Sungai Puar	0,001	2
61	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2004	Ampek Koto Palembang	0,001	8
62	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2005	Tigo Koto Silungkang	0,001	6
63	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2006	Salareh Aia	0,001	9
64	Sungai Pua	13.06.12	13.06.12.2001	Padang Laweh	0,001	1
65	Sungai Pua	13.06.12	13.06.12.2002	Sungai Pua	0,001	12
66	Sungai Pua	13.06.12	13.06.12.2003	Batagak	0,001	3
67	Sungai Pua	13.06.12	13.06.12.2004	Batu Palano	0,001	5
68	Sungai Pua	13.06.12	13.06.12.2005	Sariak	0,001	1
69	Ampek Nagari	13.06.13	13.06.13.2001	Batu Kambing	0,001	6
70	Ampek Nagari	13.06.13	13.06.13.2002	Sitalang	0,001	1
71	Ampek Nagari	13.06.13	13.06.13.2003	Bawan	0,001	17
72	Ampek Nagari	13.06.13	13.06.13.2004	Sitanang	0,001	1
73	Candung	13.06.14	13.06.14.2001	Canduang Koto Laweh	0,001	14
74	Candung	13.06.14	13.06.14.2002	Lasi	0,001	6
75	Candung	13.06.14	13.06.14.2003	Bukik Batabuah	0,001	6
76	Kamang Magek	13.06.15	13.06.15.2001	Magek	0,001	10
77	Kamang Magek	13.06.15	13.06.15.2002	Kamang Hilia	0,001	20
78	Kamang Magek	13.06.15	13.06.15.2003	Kamang Mudiak	0,001	9
79	Malalak	13.06.16	13.06.16.2001	Malalak Utara	0,001	2
80	Malalak	13.06.16	13.06.16.2002	Malalak Timur	0,001	1
81	Malalak	13.06.16	13.06.16.2003	Malalak Selatan	0,001	1
82	Malalak	13.06.16	13.06.16.2004	Malalak Barat	0,001	3

VALIDASI DATA PENDUKUNG

Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA-Desa) 2024

Kabupaten : Agam

a. Luas Wilayah Desa (Ha)	b. Jumlah Penduduk Desa	c. Jumlah Rumah Tangga	d. Tingkat Kepadatan Penduduk
KESEPAKATAN	KESEPAKATAN	KESEPAKATAN	KESEPAKATAN
2023	2023	2023	2023

Sumber
Tahun

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	a. Data yang dipakai di FSVA (Ha)	b. Data yang dipakai di FSVA (Jiwa)	c. Data yang dipakai di FSVA (RT)	d. Data yang dipakai di FSVA (Jiwa/Km2)
1	Tanjung Mutiara	13.06.01	13.06.01.2001	Tiku Selatan	31,42	12.872	3221	3.221,22
2	Tanjung Mutiara	13.06.01	13.06.01.2002	Tiku Utara	39,52	10.062	2518	2.518,02
3	Tanjung Mutiara	13.06.01	13.06.01.2003	Tiku Limo Jorong	134,79	11.228	2810	2.809,81
4	Lubuk Basung	13.06.02	13.06.02.2001	Lubuk Basung	114,71	40.733	10193	10.193,44
5	Lubuk Basung	13.06.02	13.06.02.2002	Geragahan	26,25	8.090	2025	2.024,52
6	Lubuk Basung	13.06.02	13.06.02.2003	Kampung Pinang	5,91	4.508	1128	1.128,13
7	Lubuk Basung	13.06.02	13.06.02.2004	Kampung Tengah	14,68	7.475	1871	1.870,62
8	Lubuk Basung	13.06.02	13.06.02.2005	Manggopoh	116,85	23.331	5839	5.838,59
9	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2001	Tanjung Sani	75,03	7.808	1954	1.953,95
10	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2002	Sungai Batang	28,13	4.552	1139	1.139,14
11	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2003	Maninjau	25,60	3.590	898	898,40
12	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2004	Bayua	30,74	6.404	1603	1.602,60
13	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2006	Koto Kaciak	19,59	4.031	1009	1.008,76
14	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2007	Duo Koto	11,69	3.300	826	825,83
15	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2008	Koto Gadang Anam Koto	17,08	2.450	613	613,11
16	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2009	Koto Malintang	29,14	4.008	1003	1.003,00
17	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2010	Paninjauan	7,03	2.310	578	578,08
18	Matua	13.06.04	13.06.04.2001	Matua Hilia	16,00	3.450	863	863,36
19	Matua	13.06.04	13.06.04.2002	Matua Mudiak	16,27	5.978	1496	1.496,00
20	Matua	13.06.04	13.06.04.2003	Tigo Balai	16,69	3.632	909	908,91
21	Matua	13.06.04	13.06.04.2004	Lawang	27,00	3.991	999	998,75
22	Matua	13.06.04	13.06.04.2005	Parik Panjang	6,25	578	145	144,64
23	Matua	13.06.04	13.06.04.2006	Panta Pauh	11,48	2.020	506	505,51
24	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2002	Sungai Landia	16,07	2.412	604	603,60
25	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2003	Balingka	18,20	7.253	1815	1.815,07
26	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2004	Koto Tuo	7,81	4.181	1046	1.046,30
27	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2005	Guguk Tabek Sarajo	2,90	4.239	1061	1.060,81
28	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2006	Koto Panjang	13,46	3.081	771	771,02
29	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2007	Sianok Anam Suku	5,01	2.828	708	707,71
30	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2008	Koto Gadang	5,27	2.598	650	650,15
31	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2001	Padang Lua	3,42	6.411	1604	1.604,35
32	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2002	Taluak Ampek Suku	3,41	4.923	1232	1.231,98
33	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2003	Pakan Sinayan	5,21	5.469	1369	1.368,62
34	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2004	Kubang Putihah	5,22	8.097	2026	2.026,28
35	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2005	Ladang Laweh	4,42	5.638	1411	1.410,91

36	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2006	Cingkariang	5,07	5.561	1392	1.391,64
37	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2007	Sungai Tanang	1,70	2.429	608	607,86
38	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2001	Batu Taba	2,57	6.626	1658	1.658,16
39	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2002	Biaro Gadang	6,43	7.788	1949	1.948,95
40	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2003	Lambah	3,20	4.660	1166	1.166,17
41	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2004	Panampung	6,80	7.991	2000	1.999,75
42	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2005	Ampang Gadang	4,00	9.253	2316	2.315,57
43	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2006	Pasia	0,90	3.044	762	761,76
44	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2008	Balai Gurah	6,76	6.015	1505	1.505,26
45	Baso	13.06.08	13.06.08.2001	Koto Tinggi	15,60	9.406	2354	2.353,85
46	Baso	13.06.08	13.06.08.2002	Tabek Panjang	19,19	10.122	2533	2.533,03
47	Baso	13.06.08	13.06.08.2004	Simarasok	14,25	6.693	1675	1.674,92
48	Baso	13.06.08	13.06.08.2005	Padang Tarok	16,34	8.533	2135	2.135,39
49	Baso	13.06.08	13.06.08.2006	Salo	3,10	1.354	339	338,84
50	Baso	13.06.08	13.06.08.2007	Koto Baru	1,82	1.730	433	432,93
51	Tilatang Kamang	13.06.09	13.06.09.2001	Koto Tengah	53,87	18.368	4597	4.596,60
52	Tilatang Kamang	13.06.09	13.06.09.2003	Gadut	36,45	16.139	4039	4.038,79
53	Tilatang Kamang	13.06.09	13.06.09.2004	Kapau	5,54	3.087	773	772,52
54	Palupuh	13.06.10	13.06.10.2001	Koto Rantang	42,87	2.993	749	749,00
55	Palupuh	13.06.10	13.06.10.2002	Pasia Laweh	74,32	5.082	1272	1.271,77
56	Palupuh	13.06.10	13.06.10.2003	Pagadih	34,08	1.951	488	488,24
57	Palupuh	13.06.10	13.06.10.2004	Nan Tujuh	85,09	5.477	1371	1.370,62
58	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2001	Baringin	23,22	2.933	734	733,98
59	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2002	Sipinang	44,22	923	231	230,98
60	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2003	Sungai Puar	40,54	2.066	517	517,02
61	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2004	Ampek Koto Palembang	61,37	4.614	1.155	1.154,65
62	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2005	Tigo Koto Silungkang	88,31	8.388	2.099	2.099,10
63	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2006	Salareh Aia	92,11	16.567	4.146	4.145,90
64	Sungai Pua	13.06.12	13.06.12.2001	Padang Laweh	2,68	3.783	947	946,70
65	Sungai Pua	13.06.12	13.06.12.2002	Sungai Pua	16,90	14.597	3.653	3.652,90
66	Sungai Pua	13.06.12	13.06.12.2003	Batagak	9,84	3.930	983	983,48
67	Sungai Pua	13.06.12	13.06.12.2004	Batu Palano	3,47	3.083	772	771,52
68	Sungai Pua	13.06.12	13.06.12.2005	Sariak	11,40	2.219	555	555,31
69	Ampek Nagari	13.06.13	13.06.13.2001	Batu Kambing	30,68	4.663	1.167	1.166,92
70	Ampek Nagari	13.06.13	13.06.13.2002	Sitalang	30,43	3.125	782	782,03
71	Ampek Nagari	13.06.13	13.06.13.2003	Bawan	170,43	20.375	5.099	5.098,85
72	Ampek Nagari	13.06.13	13.06.13.2004	Sitanang	37,15	2.343	586	586,34
73	Candung	13.06.14	13.06.14.2001	Canduang Koto Laweh	25,73	9.654	2.416	2.415,92
74	Candung	13.06.14	13.06.14.2002	Lasi	15,34	6.679	1.671	1.671,42
75	Candung	13.06.14	13.06.14.2003	Bukik Batabuah	11,22	9.384	2.348	2.348,35
76	Kamang Magek	13.06.15	13.06.15.2001	Magek	15,60	4.885	1.222	1.222,47
77	Kamang Magek	13.06.15	13.06.15.2002	Kamang Hilia	16,31	5.576	1.395	1.395,40
78	Kamang Magek	13.06.15	13.06.15.2003	Kamang Mudiak	73,00	11.783	2.949	2.948,70
79	Malalak	13.06.16	13.06.16.2001	Malalak Utara	18,37	2.535	634	634,38
80	Malalak	13.06.16	13.06.16.2002	Malalak Timur	35,23	2.762	691	691,19
81	Malalak	13.06.16	13.06.16.2003	Malalak Selatan	28,49	2.718	680	680,18
82	Malalak	13.06.16	13.06.16.2004	Malalak Barat	22,40	2.705	677	676,93

PERHITUNGAN DATA INDIKATOR INDIVIDU

Kabupaten : Agam

Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA-Desa) 2024

					Arah Persepsi Indikator		Positif (+)		Negatif (-)			
					Aspek		Ketersediaan	Ketersediaan	Akses	Akses	Pemanfaatan	Pemanfaatan
No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	1. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	2. Rasio Jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	3. Rasio Jmlh Pddk tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk	4. Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	5. Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga	6. Rasio Jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk		
1	Tanjung Mutiara	13.06.01	13.06.01.2001	Tiku Selatan	0,1038	0,0593	0,0153	1	0,0000	0,0449		
2	Tanjung Mutiara	13.06.01	13.06.01.2002	Tiku Utara	0,1604	0,0405	0,0082	1	0,0000	0,0790		
3	Tanjung Mutiara	13.06.01	13.06.01.2003	Tiku Limo Jorong	0,8202	0,0409	0,0008	1	0,0000	0,0642		
4	Lubuk Basung	13.06.02	13.06.02.2001	Lubuk Basung	0,2283	0,0600	0,0047	1	0,0000	0,0084		
5	Lubuk Basung	13.06.02	13.06.02.2002	Geragahan	0,2297	0,0380	0,0091	1	0,0000	0,0375		
6	Lubuk Basung	13.06.02	13.06.02.2003	Kampung Pinang	0,0934	0,0895	0,0031	1	0,0000	0,0042		
7	Lubuk Basung	13.06.02	13.06.02.2004	Kampung Tengah	0,1439	0,0845	0,0027	1	0,0000	0,0147		
8	Lubuk Basung	13.06.02	13.06.02.2005	Manggopoh	0,4261	0,0343	0,0120	1	0,0000	0,0292		
9	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2001	Tanjung Sani	0,6139	0,0701	0,0073	1	0,0000	0,3752		
10	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2002	Sungai Batang	0,4758	0,1062	0,0053	1	0,0000	0,0703		
11	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2003	Maninjau	0,3831	0,0913	0,0011	1	0,0000	0,0366		
12	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2004	Bayua	0,3012	0,0861	0,0062	1	0,0000	0,0384		
13	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2006	Koto Kaciak	0,4024	0,0763	0,0050	1	0,0000	0,0327		

14	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2007	Duo Koto	0,2410	0,0908	0,0000	1	0,0000	0,0390
15	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2008	Koto Gadang Anam Koto	0,4957	0,0603	0,0041	1	0,0000	0,0569
16	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2009	Koto Malintang	0,5032	0,1575	0,0030	1	0,0000	0,1457
17	Tanjung Raya	13.06.03	13.06.03.2010	Paninjauan	0,2355	0,0640	0,0000	1	0,0000	0,0176
18	Matua	13.06.04	13.06.04.2001	Matua Hilia	0,2371	0,0463	0,0020	1	0,0000	0,0533
19	Matua	13.06.04	13.06.04.2002	Matua Mudiak	0,1307	0,1451	0,0114	1	0,0000	0,0325
20	Matua	13.06.04	13.06.04.2003	Tigo Balai	0,3601	0,0363	0,0055	1	0,0000	0,1669
21	Matua	13.06.04	13.06.04.2004	Lawang	0,5111	0,0260	0,0063	1	0,0000	0,0900
22	Matua	13.06.04	13.06.04.2005	Parik Panjang	0,2379	0,1244	0,0000	1	0,0000	0,0625
23	Matua	13.06.04	13.06.04.2006	Panta Pauh	0,2126	0,0593	0,0124	1	0,0000	0,0574
24	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2002	Sungai Landia	0,4878	0,1773	0,0083	1	0,0000	0,1607
25	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2003	Balingka	0,1970	0,0705	0,0197	1	0,0000	0,1820
26	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2004	Koto Tuo	0,0934	0,0507	0,0177	1	0,0000	0,0156
27	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2005	Guguk Tabek Sarajo	0,0377	0,0358	0,0057	1	0,0000	0,0036
28	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2006	Koto Panjang	0,3376	0,0700	0,0412	1	0,0000	0,0673
29	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2007	Sianok Anam Suku	0,0958	0,1950	0,0088	1	0,0000	0,0100
30	IV Koto	13.06.05	13.06.05.2008	Koto Gadang	0,1259	0,0831	0,0131	1	0,0000	0,0527
31	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2001	Padang Lua	0,0264	0,1128	0,0034	1	0,0000	0,0026
32	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2002	Taluak Ampek Suku	0,0219	0,1104	0,0000	1	0,0000	0,0021
33	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2003	Pakan Sinayan	0,0521	0,0643	0,0055	1	0,0000	0,0174
34	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2004	Kubang Putih	0,0438	0,0691	0,0035	1	0,0000	0,0033
35	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2005	Ladang Laweh	0,0381	0,0376	0,0021	1	0,0000	0,0063
36	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2006	Cingkariang	0,0635	0,0697	0,0110	1	0,0000	0,0101
37	Banuhampu	13.06.06	13.06.06.2007	Sungai Tanang	0,0511	0,0313	0,0078	1	0,0000	0,0057
38	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2001	Batu Taba	0,0273	0,0579	0,0039	1	0,0000	0,0064

39	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2002	Biaro Gadang	0,0726	0,1211	0,0000	1	0,0000	0,0031
40	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2003	Lambah	0,0594	0,0712	0,0000	1	0,0000	0,0019
41	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2004	Panampung	0,0697	0,0440	0,0000	1	0,0000	0,0049
42	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2005	Ampang Gadang	0,0297	0,0272	0,0000	1	0,0000	0,0014
43	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2006	Pasia	0,0188	0,0551	0,0000	1	0,0000	0,0011
44	Ampek Angkek	13.06.07	13.06.07.2008	Balai Gurah	0,0652	0,0425	0,0037	1	0,0000	0,0056
45	Baso	13.06.08	13.06.08.2001	Koto Tinggi	0,1469	0,0289	0,0037	1	0,0000	0,0520
46	Baso	13.06.08	13.06.08.2002	Tabek Panjang	0,1131	0,0620	0,0010	1	0,0000	0,0087
47	Baso	13.06.08	13.06.08.2004	Simarasok	0,1289	0,0203	0,0036	1	0,0000	0,0713
48	Baso	13.06.08	13.06.08.2005	Padang Tarok	0,1273	0,0318	0,0026	1	0,0000	0,0233
49	Baso	13.06.08	13.06.08.2006	Salo	0,1928	0,0620	0,0000	1	0,0000	0,0103
50	Baso	13.06.08	13.06.08.2007	Koto Baru	0,0954	0,0970	0,0035	1	0,0000	0,0182
51	Tilatang Kamang	13.06.09	13.06.09.2001	Koto Tengah	0,1866	0,0633	0,0014	1	0,0000	0,0163
52	Tilatang Kamang	13.06.09	13.06.09.2003	Gadut	0,1475	0,0864	0,0024	1	0,0000	0,0135
53	Tilatang Kamang	13.06.09	13.06.09.2004	Kapau	0,1299	0,0828	0,0023	1	0,0000	0,0092
54	Palupuh	13.06.10	13.06.10.2001	Koto Rantang	0,7474	0,1121	0,0114	2	0,0000	0,2144
55	Palupuh	13.06.10	13.06.10.2002	Pasia Laweh	0,6665	0,0440	0,0169	2	0,0000	0,3716
56	Palupuh	13.06.10	13.06.10.2003	Pagadiah	0,9908	0,0369	0,0856	2	0,0000	0,1136
57	Palupuh	13.06.10	13.06.10.2004	Nan Tujuh	0,7208	0,0452	0,0150	2	0,0000	0,2127
58	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2001	Baringin	0,2338	0,1008	0,0020	1	0,0000	0,2322
59	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2002	Sipinang	0,3391	0,2468	0,0000	1	0,0000	0,4422
60	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2003	Sungai Puar	0,3258	0,0832	0,0000	1	0,0000	0,2027
61	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2004	Ampek Koto Palembang	0,5119	0,0476	0,0043	1	0,0000	0,0767
62	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2005	Tigo Koto Silungkang	0,2675	0,0848	0,0201	1	0,0000	0,1472
63	Palembayan	13.06.11	13.06.11.2006	Salareh Aia	0,4243	0,0444	0,0040	1	0,0000	0,1023

64	Sungai Pua	13.06.12	13.06.12.2001	Padang Laweh	0,0529	0,0370	0,0000	1	0,0000	0,0268
65	Sungai Pua	13.06.12	13.06.12.2002	Sungai Pua	0,0560	0,0312	0,0014	1	0,0000	0,0141
66	Sungai Pua	13.06.12	13.06.12.2003	Batagak	0,1378	0,0417	0,0020	1	0,0000	0,0328
67	Sungai Pua	13.06.12	13.06.12.2004	Batu Palano	0,0908	0,0220	0,0065	1	0,0000	0,0069
68	Sungai Pua	13.06.12	13.06.12.2005	Sariak	0,2122	0,0378	0,0000	1	0,0000	0,1140
69	Ampek Nagari	13.06.13	13.06.13.2001	Batu Kambing	0,4489	0,1123	0,0148	1	0,0000	0,0511
70	Ampek Nagari	13.06.13	13.06.13.2002	Sitalang	0,6643	0,0371	0,0454	1	0,0000	0,3043
71	Ampek Nagari	13.06.13	13.06.13.2003	Bawan	0,5707	0,0398	0,0118	1	0,0000	0,1003
72	Ampek Nagari	13.06.13	13.06.13.2004	Sitanang	1,0817	0,0836	0,0171	1	0,0000	0,3715
73	Candung	13.06.14	13.06.14.2001	Canduang Koto Laweh	0,1515	0,0265	0,0004	1	0,0000	0,0184
74	Candung	13.06.14	13.06.14.2002	Lasi	0,1371	0,0150	0,0039	1	0,0000	0,0256
75	Candung	13.06.14	13.06.14.2003	Bukik Batabuah	0,1031	0,1086	0,0021	1	0,0000	0,0187
76	Kamang Magek	13.06.15	13.06.15.2001	Magek	0,1503	0,0605	0,0045	1	0,0000	0,0156
77	Kamang Magek	13.06.15	13.06.15.2002	Kamang Hilia	0,2327	0,0573	0,0009	1	0,0000	0,0082
78	Kamang Magek	13.06.15	13.06.15.2003	Kamang Mudiak	0,4401	0,0573	0,0051	1	0,0000	0,0811
79	Malalak	13.06.16	13.06.16.2001	Malalak Utara	0,2362	0,0741	0,0000	1	0,0000	0,0919
80	Malalak	13.06.16	13.06.16.2002	Malalak Timur	0,8077	0,0926	0,0018	1	0,0000	0,3523
81	Malalak	13.06.16	13.06.16.2003	Malalak Selatan	0,7009	0,1014	0,0044	1	0,0000	0,2849
82	Malalak	13.06.16	13.06.16.2004	Malalak Barat	0,5804	0,0842	0,0000	1	0,0000	0,0747

Hasil Analisis FSVA Tahun 2024

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	1. P. Lahan	2. P. Sarana	3. P. Tdk Sejah	4. P. Jalan	5. P. No. Water	6. P. Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
1	Tanjung Mutiara	13070100	1307010001	Tiku Selatan	6	3	1	4	6	6	66,39	79	4
2	Tanjung Mutiara	13070100	1307010002	Tiku Utara	6	2	1	4	6	6	77,63	47	6
3	Tanjung Mutiara	13070100	1307010003	Tiku Limo Jorong	6	2	4	4	6	6	84,44	20	6
4	Lubuk Basung	13070200	1307020005	Lubuk Basung	6	3	1	4	6	6	82,27	28	6
5	Lubuk Basung	13070200	1307020002	Geragahan	6	2	1	4	6	6	76,63	51	5
6	Lubuk Basung	13070200	1307020004	Kampung Pinang	6	5	1	4	6	6	78,51	45	6
7	Lubuk Basung	13070200	1307020003	Kampung Tengah	6	4	1	4	6	6	84,20	21	6
8	Lubuk Basung	13070200	1307020001	Manggopoh	6	1	1	4	6	6	73,76	57	5
9	Tanjung Raya	13070300	1307030001	Tanjung Sani	6	4	1	4	6	5	80,49	38	6
10	Tanjung Raya	13070300	1307030002	Sungai Batang	6	5	1	4	6	6	85,04	17	6
11	Tanjung Raya	13070300	1307030003	Maninjau	6	5	3	4	6	6	87,76	7	6
12	Tanjung Raya	13070300	1307030004	Bayua	6	4	1	4	6	6	82,71	27	6
13	Tanjung Raya	13070300	1307030007	Koto Kaciak	6	4	1	4	6	6	83,18	23	6
14	Tanjung Raya	13070300	1307030005	Duo Koto	6	5	5	4	6	6	88,74	4	6
15	Tanjung Raya	13070300	1307030008	Koto Gadang Anam Koto	6	3	1	4	6	6	82,84	26	6
16	Tanjung Raya	13070300	1307030009	Koto Malintang	6	6	1	4	6	6	90,77	3	6
17	Tanjung Raya	13070300	1307030006	Paninjauan	6	4	5	4	6	6	86,82	12	6
18	Matua	13070400	1307040004	Matua Hilia	6	3	2	4	6	6	83,71	22	6
19	Matua	13070400	1307040001	Matua Mudiak	6	6	1	4	6	6	79,12	42	6
20	Matua	13070400	1307040005	Tigo Balai	6	2	1	4	6	6	79,81	40	6
21	Matua	13070400	1307040006	Lawang	6	1	1	4	6	6	78,40	46	6

22	Matua	13070400	1307040002	Parik Panjang	6	6	5	4	6	6	91,14	2	6
23	Matua	13070400	1307040003	Panta Pauh	6	3	1	4	6	6	75,21	54	5
24	IV Koto	13070500	1307050003	Sungai Landia	6	6	1	4	6	6	87,35	10	6
25	IV Koto	13070500	1307050002	Balingka	6	4	1	4	6	6	70,60	67	4
26	IV Koto	13070500	1307050001	Koto Tuo	6	3	1	4	6	6	62,43	82	3
27	IV Koto	13070500	1307050007	Guguk Tabek Sarajo	2	2	1	4	6	6	66,11	80	4
28	IV Koto	13070500	1307050004	Koto Panjang	6	4	1	4	6	6	70,59	68	4
29	IV Koto	13070500	1307050005	Sianok Anam Suku	6	6	1	4	6	6	81,09	35	6
30	IV Koto	13070500	1307050006	Koto Gadang	6	4	1	4	6	6	72,58	59	5
31	Banuhampu	13070610	1307061003	Padang Lua	2	6	1	4	6	6	72,37	61	4
32	Banuhampu	13070610	1307061006	Taluak Ampek Suku	1	6	5	4	6	6	74,83	55	5
33	Banuhampu	13070610	1307061001	Pakan Sinayan	3	4	1	4	6	6	69,91	71	4
34	Banuhampu	13070610	1307061007	Kubang Putih	3	4	1	4	6	6	71,18	66	4
35	Banuhampu	13070610	1307061005	Ladang Laweh	2	2	2	4	6	6	69,50	74	4
36	Banuhampu	13070610	1307061004	Cingkariang	4	4	1	4	6	6	66,58	78	4
37	Banuhampu	13070610	1307061002	Sungai Tanang	3	1	1	4	6	6	65,30	81	4
38	Ampek Angkek	13070700	1307070001	Batu Taba	2	3	1	4	6	6	68,11	77	4
39	Ampek Angkek	13070700	1307070005	Biaro Gadang	4	6	5	4	6	6	81,27	34	6
40	Ampek Angkek	13070700	1307070006	Lambah	4	4	5	4	6	6	76,22	52	5
41	Ampek Angkek	13070700	1307070007	Panampung	4	3	5	4	6	6	75,43	53	5
42	Ampek Angkek	13070700	1307070004	Ampang Gadang	2	1	5	4	6	6	69,75	73	4
43	Ampek Angkek	13070700	1307070002	Pasia	1	3	5	4	6	6	70,53	69	4
44	Ampek Angkek	13070700	1307070003	Balai Gurah	4	2	1	4	6	6	71,49	65	4
45	Baso	13070800	1307080001	Koto Tinggi	6	1	1	4	6	6	79,60	41	6
46	Baso	13070800	1307080004	Tabek Panjang	6	3	3	4	6	6	80,67	37	6
47	Baso	13070800	1307080003	Simarasok	6	1	1	4	6	6	77,10	49	5

48	Baso	13070800	1307080002	Padang Tarok	6	1	1	4	0	6	78,66	44	6
49	Baso	13070800	1307080005	Salo	6	3	5	4	6	6	86,68	13	6
50	Baso	13070800	1307080006	Koto Baru	6	5	1	4	6	6	78,93	43	6
51	Tilatang Kamang	13070900	1307090003	Koto Tengah	6	4	3	4	6	6	85,48	15	6
52	Tilatang Kamang	13070900	1307090001	Gadut	6	4	2	4	6	6	85,03	18	6
53	Tilatang Kamang	13070900	1307090002	Kapau	6	4	2	4	6	6	82,88	25	6
54	Palupuh	13071100	1307110001	Koto Rantang	6	6	1	3	6	6	79,88	39	6
55	Palupuh	13071100	1307110002	Pasia Laweh	6	3	1	3	6	5	69,86	72	4
56	Palupuh	13071100	1307110003	Pagadih	6	2	1	3	6	6	68,22	75	4
57	Palupuh	13071100	1307110004	Nan Tujuh	6	3	1	3	6	6	71,80	62	4
58	Palembayan	13071000	1307100001	Baringin	6	5	2	4	6	6	87,54	9	6
59	Palembayan	13071000	1307100003	Sipinang	6	6	5	4	6	5	99,74	1	6
60	Palembayan	13071000	1307100002	Sungai Puar	6	4	5	4	6	6	88,16	6	6
61	Palembayan	13071000	1307100004	Ampek Koto Palembang	6	3	1	4	6	6	81,70	32	6
62	Palembayan	13071000	1307100005	Tigo Koto Silungkang	6	4	1	4	6	6	71,64	64	4
63	Palembayan	13071000	1307100006	Salareh Aia	6	3	1	4	6	6	81,74	30	6
64	Sungai Pua	13070620	1307062002	Padang Laweh	4	2	5	4	6	6	73,04	58	5
65	Sungai Pua	13070620	1307062005	Sungai Pua	4	1	3	4	6	6	71,74	63	4
66	Sungai Pua	13070620	1307062003	Batagak	6	2	2	4	6	6	81,03	36	6
67	Sungai Pua	13070620	1307062001	Batu Palano	6	1	1	4	6	6	70,31	70	4
68	Sungai Pua	13070620	1307062004	Sariak	6	2	5	4	6	6	84,95	19	6
69	Ampek Nagari	13070210	1307021003	Batu Kambing	6	6	1	4	6	6	76,79	50	5
70	Ampek Nagari	13070210	1307021004	Sitalang	6	2	1	4	6	6	68,15	76	4
71	Ampek Nagari	13070210	1307021001	Bawan	6	2	1	4	6	6	74,32	56	5
72	Ampek Nagari	13070210	1307021002	Sitanang	6	4	1	4	6	5	72,55	60	5
73	Candung	13070710	1307071003	Canduang Koto Laweh	6	1	4	4	6	6	82,95	24	6

74	Candung	13070710	1307071002	Lasi	6	1	1	4	0	6	77,36	48	5
75	Candung	13070710	1307071001	Bukik Batabuah	6	6	2	4	6	6	81,84	29	6
76	Kamang Magek	13070910	1307091001	Magek	6	3	1	4	6	6	81,53	33	6
77	Kamang Magek	13070910	1307091002	Kamang Hilia	6	3	3	4	6	6	85,53	14	6
78	Kamang Magek	13070910	1307091003	Kamang Mudiak	6	3	1	4	6	6	81,71	31	6
79	Malalak	13070510	1307051004	Malalak Utara	6	4	5	4	6	6	87,54	8	6
80	Malalak	13070510	1307051003	Malalak Timur	6	5	2	4	6	5	87,11	11	6
81	Malalak	13070510	1307051001	Malalak Selatan	6	5	1	4	6	6	85,40	16	6
82	Malalak	13070510	1307051002	Malalak Barat	6	4	5	4	6	6	88,27	5	6